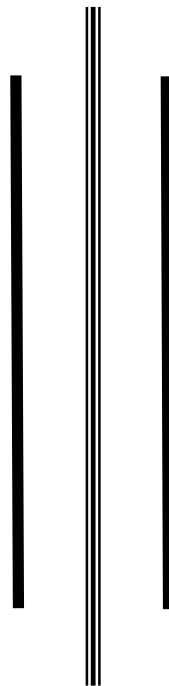


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR**



RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2026



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
NOMOR: KEP/ 77 / VII / 2025 TANGGAL 18 JULI 2025**

Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar	
Daftar isi	i
BAB I. LATAR BELAKANG.....	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan.....	4
b. Analisa Perkembangan Situasi Daerah hukum di kota Makassar	43
2. Identifikasi Masalah.....	44
BAB II. PENJABARAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	68
1. Visi dan Misi.....	68
a. Visi dan Misi Polda Sulsel.....	70
b. Visi dan Misi Polrestabes Makassar.....	72
2. Tujuan Jangka Menengah.....	72
a. Tujuan Polda Sulsel.....	73
b. Tujuan Polrestabes Makassar.....	74
3. Sasaran Prioritas.....	74
a. Sasaran Polda Sulsel.....	74
b. Sasaran Polrestabes Makassar.....	76
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	76
1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel.....	76
2. Arah Kebijakan dan Staregi Polrestabes Makassar.....	108
BAB IV. Program Kegiatan dan Alokasi Pagu Indikatif Polrestabes Makassar....	132
1. Program dan Kegiatan.....	132
2. Alokasi Pagu Indikatif Polrestabes Makassar.....	134
BAB V. Penutup.....	139
Lampiran :	
➤ RKT	
➤ FORM 33	

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
Nomor: Kep/ 77 /VII/2025

Tentang

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
TAHUN 2026

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perencanaan Jangka Menengah Kepolisian Resor Kota Besar Makassar maka disusun Rencana Strategis Polrestabes Makassar Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Polri, dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

2. Surat Telegram Kapolda Sulsel Nomor :B/Und-439/VII/REN.1.3./2025/Rorena tanggal 11 Juli 2025 perihal Sosialisasi Naskah Rencana Strategis Polda Sulsel Tahun 2025-2029 dan Naskah Rencana Kerja T.A. 2026.
3. Surat Perintah Kapolrestabes Makassar Nomor Sprin/2012/VII/REN.1.3./2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Sosialisasi Naskah Rencana Strategis Polda Sulsel Tahun 2025-2029 dan Naskah Rencana Kerja T.A. 2026.
4. Perkiraan Keamanan Intelijen Polrestabes Makassar Tahun 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TENTANG RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR TAHUN 2026.

1. Rincian Pagu Indikatif Polrestabes Makassar T.A.2026;
2. Draf Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan T.A. 2026 untuk dijadikan pedoman;
3. Rencana Kerja Kepolisian Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menjadi dasar penjabaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kemenetrian/Lembaga (RKA-KL) Unit Organisasi dan Satker
4. hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan memerlukan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri;
5. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 18 Juli 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL



Kepada Yth.:

1. Kapolda Sulsel
2. Irwasda Polda Sulsel
3. Karo rena Polda Sulsel

NASKAH RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR T.A. 2026

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun kedua dari tahapan Rancangan *Grand Strategy* Polri 2025-2045 merupakan tahun kedua dari agenda Renstra Polri Tahun 2025-2029 yang ada sebagai kelanjutan Rancangan Rencana Kerja Polri T.A. 2026, ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri 2025-2029 dengan memperhatikan RPJMN 2025-2029, penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 dan Tahun 2026 akan menjadi momen penting dalam mengawali arah kebijakan Polri yang terdiri dari enam aspek dalam rancangan *Grand Strategy* Polri yaitu (1) Aspek Pemeliharaan Kamtibmas, (2) Aspek Penegakan Hukum, (3) Aspek Pelayanan Publik, (4) Aspek Profesionalisme SDM dan Budaya Organisasi, (5) Aspek Modernisasi Almitsus dan (6) Aspek Dukungan Manajemen. Untuk mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Sejumlah potensi gangguan Kamtibmas di tahun itu perlu diantisipasi secara tepat. Polrestabes Makassar melalui segenap jajarannya, telah siap memberikan dukungan Kamtibmas secara maksimal pada penguatan menyeluruh terkait hal-hal yang bersifat fundamental, terutama pada aspek-aspek internal, yang bisa mendukung peningkatan kinerja Polri. Hasil pada peningkatan tahap ini diharapkan sudah bisa terlihat pada peningkatan kinerja yang berimplikasi pada pelaksanaan Renstra Polrestabes Makassar 2025 – 2029. Sebagai lanjutan pelaksanaan arah kebijakan dalam rangka mendukung Arah Kebijakan Tahun 2025 maka disusunlah Renja T.A. 2026 kebijakan prioritas nasional pemerintah Tahun 2026 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada prioritas nasional nomor 2 yaitu memantapkan sistem pertahanan.....

pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta prioritas nasional nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri pada Polrestabes Makassar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur yang berbasis TI digital dengan dukungan alimatsus Polri dan sarana prasarana yang modern dalam rangka mewujudkan *“Transformasi menuju Polri yang Presisi”* guna mendukung terwujudnya Indonesia aman, damai dan bersatu.

Seiring dengan perjalanan waktu apresiasi yang positif atau kritik yang membangun terhadap kinerja Polrestabes Makassar dari pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang, tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah Kota Makassar kepada Polrestabes Makassar untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tuntutan dan harapan masyarakat tersebut antara lain: (1) Polri yang professional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam memberikan pelayanan Kepolisian; (2) menggelar kekuatan Polri di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman; (3) menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana; (4) meningkatnya fungsi Intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap gangguan Kamtibmas.

Polri adalah institusi bagian dari fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri

(Kamdagri).....

(Kamdagri) dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) harus mampu bersikap responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai strategi dan program Pemolisian untuk mewujudkan Kamdagri demi terselenggaranya pembangunan nasional. Pelaksanaan tugas Polri pada daerah hukum Kota Makassar telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Pada umumnya, kondisi Kamtibmas di daerah hukum Polrestabes Makassar sampai saat ini relatif kondusif, walaupun masih ada beberapa penanganan masalah keamanan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, seperti potensi konflik antar kelompok masyarakat, anarkisme dan tindak kekerasan masih dapat terjadi secara turbulensi dengan tidak mengenal waktu dan tempat yang ada.

Isu nasional dan daerah adalah sebuah keadaan yang dinamis dapat dilihat dari faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berkembang, dimana personel Polrestabes Makassar dalam hal ini sebanyak 1.817 personel yang terdiri dari anggota Polri sebesar 1.770 personel dan PNS Polri 47 personel, apabila dibandingkan dengan rasio jumlah personel Polri dengan jumlah penduduk yaitu sebesar 1.474.393 jiwa, maka jumlah rasio tersebut sebesar 1:811jiwa, berikut rasio jumlah personel Polri dengan luas daerah hukum sebesar 167,84 KM² maka jumlah rasio tersebut sebesar 1:0,09 KM², hal ini menunjukkan perlunya penambahan personel mengingat semua isu strategis baik global, regional dan nasional menjadi perhatian dan pertimbangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Polrestabes Makassar Tahun 2026.

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polrestabes Makassar yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategi dapat digambarkan sebagai berikut:

a.Perkembangan.....

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Potensi Wilayah

Lingkungan strategis nasional tidak bisa terlepas dari situasi dan kondisi dalam negeri termasuk situasi dan kondisi Kota Makassar yang meliputi aspek Astagatra. Aspek Astagatra dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Trigatra dan Pancagatra yang berkembang di dalam negeri dipengaruhi oleh lingkungan strategi global maupun regional. Dinamika lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas dalam negeri, termasuk wilayah administrasi Kota Makassar yang merupakan etalase Indonesia Timur, Uraian potensi gangguan Kamtibmas dari aspek Astagatra sebagai berikut:

a) Geografi

- (1) Letak geografis kota Makassar cukup strategis karena merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Timur. Luas daerah hukum Polrestabes Makassar adalah 167,84KM², yang terdiri dari 1 Kota 12 Kecamatan, 133 Desa/Kelurahan data di peroleh dari Badan Pusat Statiistik Provensi Sulawesi Selatan dan kirka intel tahun 2026;
- (2) Wilayah Polda Kota Makassar juga berfungsi sebagai area transit, pusat pariwisata, industri dan pengembangan perekonomian kawasan timur Indonesia sehingga memiliki peranan strategis bagi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi tersebut merupakan ancaman

Potensial.....

potensial terjadinya berbagai macam gangguan Kamtibmas sehingga selalu diperlukan peningkatan upaya pengawasan dan keamanan.

- (3) Keadaan iklim dan cuaca di daerah hukum Polrestabes Makassar merupakan wilayah tropis yang memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan keadaan suhu didarat sekitar sekitar 24'C - 34'C.

b) Demografi

- (1) Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasar Data Statistik Tahun 2024 dan Kirka Intel Tahun 2026 adalah 1.474.393 jiwa yang berjenis kelamin laki- laki 732.391, dan yang berjenis kelamin perempuan 742.002, dengan rasio penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.;
- (2) Penduduk Kota Makassar dominan dihuni oleh etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar dengan mata pencaharian bergerak di bidang pertanian, perkebunan dan nelayan;
- (3) Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar pembangunan nasional, namun juga mengandung kerawanan sosial dengan dimensi yang luas dan kompleksitas. Belum tercapainya keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

c)sumber.....

c) Sumber Daya Alam

Di daerah hukum Polda Kota Makassar pengelolaan sumber daya alamnya belum optimal sehingga potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh sebagian masyarakat. Adapun potensi sumber daya alam yang ada antara lain:

- (1) Produksi stok bahan pangan padi/beras yang dikelola dengan menggunakan irigasi sehingga dapat menghasilkan 2 s.d. 3 kali panen per tahun;
- (2) Pada umumnya daerah hukum Kota Makassar yang memiliki pantai, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Beberapa wilayah yang memiliki tempat wisata antara lain Pulau Khayangan, Pulau Lae-lae Kota Makassar, yang sebagian besar dikunjungi oleh turis baik domestik maupun manca negara.

2) Ipoleksosbudkam

a) Ideologi

Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Badan Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP-7) dibubarkan. Dengan dibubarkan BP-7 terjadi kekhawatiran akan terjadi demoralisasi bangsa. Maka untuk memperkuat jiwa patriotisme dan nasionalisme, lembaga MPR RI merumuskan 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu:

(1) pancasila.....

- (1) Pancasila;
- (2) Undang–Undang Dasar Negara Kesatuan RI;
- (3) Bhineka Tunggal Ika; dan
- (4) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b) Sosial Politik

(1) Umum:

- (a) Kondisi politik nasional masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi di segala aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik cukup signifikan, antara lain semakin mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi kedaulatan rakyat, walaupun dalam pelaksanaan masih diliputi suasana euforia demokrasi yang berkepanjangan karena belum siapnya masyarakat berdemokrasi sesuai dengan aturan yang ada sehingga meninggalkan rambu-rambu yang telah disepakati dan telah diatur dalam Undang-Undang sehingga berimplikasi terhadap terganggunya stabilitas Kamtibmas.
- (b) Program pemerintahan Prabowo – Gibran dengan memperkuat Reformasi Politik diharapkan menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel serta bertujuan memperbaiki praktik politik korup, meningkatkan partisipasi rakyat dan menjamin hak sipil serta politik.

(c)pemindahan.....

- (c) Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke IKN yang digarap oleh Presiden ke – 7 Joko Widodo sempat menuai pro dan kontra dikarenakan alokasi anggaran besar dari APBN serta tidak adanya investasi swasta dan skema kerja sama. Hal ini memunculkan risiko keuangan pada APBN, namun pembangunan IKN diproyeksikan mendorong pemerataan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan yang baru serta mengurangi beban Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan yang mana dalam 17 program prioritas yang menjadi fokus utama Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia salah satunya dengan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(2) Sistem Politik:

Sistem Politik dalam negeri menganut sistem Presidensial demokrasi sesuai nilai-nilai pancasila, yang mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai mufakat namun pada kenyataannya demokrasi liberal lebih menonjol dalam setiap proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme *voting*. Beberapa hal terkait dengan sistem Politik:

(a) Otonomi Daerah

Pengaturan tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum tuntas dengan adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah,

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah belum disosialisasikan dan dijabarkan kedalam peraturan Perundang-undangan, sehingga menyebabkan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) belum dapat memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat lokal. Terjadinya tarik menarik kewenangan, serta konflik kepentingan berkaitan dengan sumber daya nasional yang berada di daerah. Adanya issue kesenjangan pembangunan antar daerah.

(b) Otonomi Khusus

Menuntut otonomi khusus yang diberlakukan di beberapa daerah tertentu dapat memicu daerah otonom lainnya menuntut untuk mendapatkan otonomi khusus (Otsus).

dukungan Otsus menunjukkan adanya ketidak serasian antara semangat otonomi daerah yang berlebihan dengan prinsip negara kesatuan.

Beberapa daerah otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan. Namun demikian manfaat dari otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, karena

penggunaan.....

penggunaan APBD belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan keadaan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan dapat membangkitkan semangat separatis.

(c) Pemekaran Daerah.

Sebagian besar daerah otonom baru, belum mempunyai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW) yang jelas. Adanya berbagai aksi unjuk rasa oleh kelompok masyarakat yang menuntut dilakukannya pemekaran daerah yang mana tuntutan tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya berbagai pertimbangan seperti tuntutan pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan berbagai permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang /tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak baik ditingkat daerah maupun pusat, tidak melalui pentahapan secara matang, mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip daerah otonom seperti batas wilayah, partisipasi rakyat serta sumber daya yang masih kurang mendukung sehingga berpotensi timbulnya konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

(d) Tuntutan Pemberlakuan Perda Syariat Islam

Adanya.....

Adanya keinginan sekelompok orang untuk memberlakukan syariat Islam mengingat mayoritas penduduk Kota Makassar beragama Islam dengan melakukan berbagai upaya yang mana upaya yang dilakukan seringkali bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat.

(3) Struktur Politik

(a) Suprastruktur

Lembaga legislatif khususnya MPR dan DPD sementara masih mencari bentuk, terutama dalam hal menata kewenangannya. DPR menjadi lembaga yang sangat kuat, sehingga sering mengambil kewenangan eksekutif. Penyelenggaraan negara masih menghadapi berbagai tuntutan masyarakat antara lain:

- masih banyaknya kasus korupsi yang belum terungkap melalui pengadilan dan semakin banyaknya kasus korupsi oleh penyelenggara negara yang terungkap ke publik.
- pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan imbalan, tanggung jawab badan/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan yang memadai.

-perkembangan.....

- perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat maupun daerah.
- tuntutan pengusutan pelanggaran HAM, penghapusan Undang-Undang BHP, perbaikan UMP, penghapusan *outsourcing*, Penolakan terhadap RUU KUHP, RUU Pertanahan, dll.

(b) Infrastruktur

- Parpol

Sistem multi partai (jumlah partai terlalu banyak) belum mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat, karena tidak menghasilkan pemenang mayoritas. Adanya partai lokal di NAD cenderung akan diikuti oleh daerah-daerah lain,

- Kelompok Politik Non Parpol:
 - Kebangkitan Aliansi LSM, seperti Jaringan Walhi, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), PPR (perserikatan Perhimpunan Rakyat), ORI (Organisasi Rakyat Independen), Jaringan LBH, Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat), dan lain-lain;
 - Kelompok Sosialis Demokrat;
 - Kekuatan berpaham anti demokrasi, seperti Hizbut Tahrir,

Kelompok.....

Kelompok Salafi, kelompok Jihad
serta kelompok lainnya;

- Kebangkitan Komunisme, seperti Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS), Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND);
 - Koalisi Aksi Penyelamat Indonesia (KAMI);
 - Anarko Syndicate.
- Hubungan antar Lembaga

Mekanisme dan prosedur hubungan antar kelembagaan baik di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif belum didukung UU terkait, akibat masih terjebak pada arogansi fungsional. Hubungan *intern* dan antar supra struktur politik kurang harmonis, akibatnya aspirasi masyarakat terabaikan. Hubungan antara supra struktur politik dengan infrastruktur politik belum berorientasi pada kepentingan nasional.

- Proses Pengambilan Keputusan

Kondisi proses politik (proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional) masih diwarnai oleh menguatnya dominasi Dewan Pengurus Pusat (DPP) Parpol terhadap para.....

para wakil rakyat maupun elite politik yang berada di kursi pemerintahan. Musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945 semakin terabaikan. Hal ini ditandai dengan masih dominannya peran fraksi dari pada peran wakil rakyat dan amanat UU yang menyatakan bahwa keputusan terbanyak dari hasil *voting* merupakan keputusan akhir.

(c) Budaya Politik

- Kondisi budaya politik belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang sesuai dengan demokrasi yang benar. Budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunis, nepotis, feodal dan anarkhis. Indikatornya antara lain pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan bernuansa kekerasan dan destruktif;
- Budaya paternalistik dan primordial masih dominan mewarnai pemilihan pemimpin suprastruktur maupun infrastruktur politik. Etika politik belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan masih banyak terjadi pemaksaan kehendak, adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik;

penguatan.....

- Penguatan politik aliran masih dominan, sehingga pemimpin kharismatik masih menjadi tumpuan dalam pengambilan keputusan partai;
- Kebebasan pers tumbuh dan berkembang, namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan. Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan ekonomi dari pada resiko sosial politik;
- Simpatisan atau massa pendukung para peserta politik terlalu fanatik sehingga seringkali terjadi benturan antar massa pendukung sehingga menjadi salah satu potensi gangguan dalam berpolitik. Di samping itu juga ujaran kebencian, isu sara, *black campaign* dan *money* politik masih saja terjadi.

(d) Masalah Kebangsaan

Kondisi kebangsaan masih akan dihadapkan pada fenomena mencairnya wawasan kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme. Indikatornya antara lain masih minimnya pemasyarakatan dan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diambil langkah-langkah konkrit maka.....

maka berpengaruh pada lunturnya wawasan Nusantara dikalangan generasi muda yang akibatnya cukup fatal pada geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai negara kepulauan karena akan dapat terpecah belah yang menyebabkan terancamnya NKRI.

c) Sosial Ekonomi

(1) Ekonomi makro

(a) Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah tumbuh secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, meskipun pandemi COVID-19 sempat memperlambat laju pertumbuhan. Pada tahun-tahun normal, pertumbuhan ekonomi Indonesia biasanya berkisar antara 4-6% per tahun.

(b) Namun ketidakstabilan situasi geopolitik global yang mempengaruhi pasokan energi global, seperti konflik Timur Tengah, konflik Rusia dengan Ukraina berdampak besar terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia seperti kenaikan harga minyak bumi yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan termasuk menaikkan harga BBM subsidi sebagai upaya mengatasi Inflasi dan membengkaknya

utang.....

utang luar negeri. Dampak lain bagi Indonesia akibat dari situasi geopolitik global dimana Indonesia merupakan eksportir utama komoditas seperti batu bara, minyak sawit (CPO), nikel dan karet, dapat berdampak dengan naiknya harga komoditas yang lebih tinggi memberikan keuntungan jangka pendek bagi pendapatan negara tetapi bisa memicu inflasi domestik serta ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap volatilitas pasar global.

- (c) Setelah mengalami krisis multidimensional, strategi pembangunan nasional, khususnya di bidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro. Dari strategi ini diharapkan akan menghasilkan nilai tukar terkelola, defisit anggaran dapat dikurang, pembayaran hutang luar negeri lancar;
- (d) Pada kenyataannya strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil karena persyaratan berupa kelembagaan keuangan yang maju, bersih dan baik belum terpenuhi. Selain itu, rendahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang luar sangat mempengaruhi perekonomian sehingga apabila terjadi kenaikan nilai tukar menyebabkan industri-industri yang bahan bakunya diimpor akan mengambil langkah-langkah antisipasi

yang.....

yang salah satunya adalah dengan mem-
PHK karyawannya;

- (e) Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan bagian proyek-proyek infrastruktur Indonesia pada masa pemerintahan yang di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah. PSN diatur melalui Peraturan Presiden, sementara pelaksanaan proyeknya dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha serta Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Landasan hukum PSN adalah Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No 109 Tahun 2020;
- (f) Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, kriteria strategis, dan kriteria operasional. Unsur kriteria dasarnya adalah kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur, serta memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

dan.....

dan wilayah sepanjang tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau. Kriteria strategis mengacu kepada manfaat proyek tersebut terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, keamanan nasional, serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang harus dipenuhi adalah adanya kajian pra studi kelayakan dan nilai investasi harus di atas Rp100 miliar atau proyek berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan masuk daftar Proyek strategis nasional, sebuah proyek infrastruktur memperoleh beberapa keunggulan berupa percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan sesuai aturan berlaku oleh para menteri terkait, Gubernur hingga Bupati. Selain itu, proyek PSN juga mendapat manfaat percepatan waktu penyediaan lahan dan jaminan keamanan politik.

- (g) Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit*) masih menjadi salah satu masalah utama. Ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku dan barang modal sering kali menyebabkan defisit ini meningkat, meskipun.....

meskipun ada perbaikan dalam ekspor komoditas utama seperti batu bara dan minyak sawit. Seiring dengan tidak stabilnya harga minyak mentah dunia, maka dimungkinkan harga minyak nasional pun tidak stabil menyesuaikan dengan harga minyak mentah dunia. Apabila terjadi hal yang demikian maka kehidupan ekonomi masyarakat juga akan tidak stabil karena kemungkinan terus terjadinya perubahan harga BBM dan TDL yang akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat terhadap harga barang-barang lainnya. Terlebih saat ini masyarakat dirisaukan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang tidak menentu.

- (h) Nilai tukar rupiah yang terus melemah dan rentan terhadap gejolak ekonomi global termasuk diantaranya adalah ulah permainan para spekulan mata uang yang bermain di pasar mata uang (Internasional Currency):

- Perbankan

Perbankan belum mampu sepenuhnya menyediakan kemudahan/aksebilitas permodalan terutama bagi koperasi dan UKM walaupun secara prinsipil pemerintah telah meresmikan program pemberian kredit kepada unit-unit usaha tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah:

birokrasi.....

birokrasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan sangat berat, minimnya sosialisasi program penjamin kredit ke unit-unit usaha kecil terutama daerah pedesaan dan lain sebagainya. Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai prioritas dalam membangun kembali perekonomian masyarakat. Kejahatan perbankan masih akan terjadi dengan berbagai modus operandi seperti pemberian kredit fiktif dalam jumlah besar, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Sebagian bank asing menjadi pesaing bank pemerintah maupun swasta nasional. Kondisi perbankan belum menunjukkan perbaikan yang disebabkan peningkatan kredit macet yang berasal dari sektor manufaktur;

- Sumber Daya Energi dan Mineral

Potensi sumber daya energi dan mineral pada tahun 2025 semakin berkurang disebabkan karena pemanfaatannya yang cukup lama, selain itu lokasi sumber daya energi dimaksud sebagian besar keberadaannya berada di dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan, sehingga menimbulkan dilema dalam pemanfaatannya.....

pemanfaatannya. Investasi eksplorasi bidang minyak bumi untuk sementara belum berkembang secara signifikan. Kondisi tersebut semakin memberatkan APBN, dan apabila harga minyak dunia kembali naik, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan merubah harga BBM sesuai dengan perubahan harga BBM dunia. Berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah untuk menghemat subsidi BBM khususnya bagi kalangan mampu dan pemerintah serta pemberian berbagai dana kompensasi kepada masyarakat miskin menimbulkan berbagai kendala karena tidak siapnya sarana dan prasarana untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan seperti: isu tumpang tindih, lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan Perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan, serta gangguan kegiatan pertambangan liar. Pergerakan harga minyak di pasar internasional sulit diprediksi. Kondisi tersebut merupakan permasalahan ekonomi yang sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.....

dunia. Hal tersebut disebabkan adanya kebutuhan dan ketergantungan beberapa sektor ekonomi terhadap bahan bakar minyak. Kebutuhan bahan bakar minyak untuk industri sebesar 45%, untuk sarana transportasi sebesar 35% dan untuk sektor lainnya sebesar 20%. Secara umum perkembangan industri belum signifikan, karena belum mendapat jaminan pasokan energi dan infrastruktur lainnya, penyediaan bahan baku dan tenaga kerja terampil serta kurangnya inovasi produk industri yang mengarah kepada peningkatan nilai tambah. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya saing industri secara lokal maupun global. Sebagian industri mempunyai masalah dengan pencemaran lingkungan. Disisi lain, penegakan hukum masih lemah sehingga dikhawatirkan kondisi ini berkelanjutan dan mempunyai dampak sosial yang luas;

- Perdagangan

Perdagangan sudah mulai bangkit. Indikatornya antara lain peningkatan ekspor non migas, namun masih menghadapi berbagai kendala. Pelaku bisnis skala kecil dan menengah mempunyai daya tahan dalam menghadapi krisis, sedangkan pelaku bisnis.....

bisnis skala besar sangat rentan menghadapi persaingan pasar global, karena selama ini masih banyak diberikan kemudahan oleh pemerintah, akibatnya tidak punya daya saing global. Penyelundupan berbagai komoditi perdagangan masih tinggi, sebagai akibat adanya perbedaan harga yang relative besar serta lemahnya sistem pengawasan di berbagai instansi terkait. Kebutuhan beras, gula, daging dan kebutuhan pokok lainnya setiap tahunnya lebih tinggi dari pasokan yang bersumber dari dalam negeri, sehingga kerap kali menimbulkan kelangkaan dan menaikkan harga di daerah tertentu. Dalam dunia perdagangan juga terkadang situasi tertentu dimanfaatkan oleh oknum ataupun kelompok yang sengaja memainkan harga jual suatu komoditi dengan menimbun barang dengan cara membatasi jumlah edar di pasaran sehingga mengganggu stabilitas harga dan berpotensi terjadinya kepanikan masyarakat. Dimana harga tersebut dapat meningkat beberapa persen dari harga sebelumnya dan beberapa harga komoditas juga mengalami kenaikan yang berimplikasi akan terjadinya inflasi. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah mengambil.....

mengambil kebijakan *import*, namun disisi lain timbul komplain dari petani dan masyarakat. Selain itu kondisi tersebut juga mengundang para pengusaha untuk mengimpor komoditi tersebut secara ilegal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan antara lain tidak terjaminnya kualitas daging *import* dari penyakit hewan. Permasalahan tersebut cenderung masih akan dihadapi maraknya program undian berhadiah yang diluncurkan oleh produsen memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tingkat pertumbuhan pusat perkulakan (Indomart, Alfamart, dan lain-lain) yang demikian tinggi baik di perkotaan maupun di daerah pinggiran telah mematikan sentra-sentra ekonomi masyarakat kecil seperti pasar tradisional dan pedagang kaki lima (PK-5).

- Transportasi

Pembangunan sarana prasarana dan aspek pendukung transportasi telah menunjukkan peningkatan, namun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan jasa transportasi yang mengutamakan keselamatan serta tarif yang terjangkau.....

terjangkau. Munculnya transportasi berbasis *online* juga memberikan pengaruh yang cukup signifikan, dimana jumlah kendaraan yang berada di jalan semakin bertambah banyak dan juga menimbulkan persaingan terhadap transportasi konvensional. Kebijakan penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana jalan berakibat kepada timbulnya masalah lalu lintas seperti kemacetan, kesemrawutan lalu lintas, kecelakaan akibat benturan sesama pengguna jalan, dsb.

- Pertanian dan Peternakan

Ketahanan pangan merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi dan diharapkan untuk dapat menanggulangi kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Swasembada beras telah terwujud, namun kebutuhan pangan lainnya seperti gula, jagung, kedelai, susu dan daging cenderung masih memerlukan tambahan yang harus dilakukan dengan mendatangkan dari luar;

Pembangunan sektor pertanian masih banyak menghadapi kendala, antara lain:

- Menyusutnya.....

- Menyusutnya lahan pertanian subur yang tergerus oleh perumahan dan industrialisasi, yang belum diimbangi dengan pengembangan pencetakan lahan pertanian baru;
- Upaya modernisasi pertanian belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat petani dan ada kecenderungan masih senang dengan sistem tradisional.

Dalam hal sarana dan prasarana pendukung pertanian, menemui kendala sebagai berikut:

- Kebutuhan irigasi semakin tidak terpenuhi dan diperlukan kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan adanya penyalahgunaan sumber daya air untuk kepentingan bisnis;
- Penyediaan pupuk dan bibit telah dikembangkan namun mekanisme distribusi kebutuhan pertanian terutama pupuk masih tetap akan menjadi masalah yang bersifat klasik yaitu selalu terjadi kelangkaan pupuk yang disebabkan terjadi penyelewengan distribusi pupuk serta banyaknya beredar pupuk palsu yang merugikan masyarakat petani;

- Daya.....

- Daya saing sektor pertanian masih lemah, sehingga persediaan dan tingkat pemenuhan kebutuhan pangan sebagian diisi oleh produk luar yang harganya lebih rendah dengan kualitas lebih baik bila dibandingkan dengan hasil pertanian lokal;
- Perubahan musim dan cuaca tidak dapat diprediksi sehingga seringkali menimbulkan kerugian yang besar dikalangan petani akibat musim hujan/musim kemarau yang tidak menentu.
- Ketenagakerjaan
Lapangan kerja yang ada belum mampu menampung jumlah angkatan kerja, sehingga menambah jumlah angka pengangguran. Jumlah angka pengangguran pada Tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dengan signifikan karena banyaknya perusahaan yang PHK karyawannya sebagai dampak dari melemahnya ekonomi global. Selain itu disebabkan pula oleh:
 - Bertambahnya pengangguran usia muda akibat putus sekolah;
 - Pengangguran tahun sebelumnya yang belum diserap pasar kerja;
 - Angkatan kerja baru;
 - pekerja.....

- Pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK);
- Banyaknya sarjana yang tidak tertampung di lapangan kerja yang ada;
- Skill tenaga kerja lokal kalah saing dengan tenaga kerja luar negeri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak tenaga kerja untuk mendesak direvisinya Undang-Undang ini. Akibat pemerintah belum mampu menciptakan kesempatan kerja di dalam negeri, telah mendorong minat angkatan kerja untuk berusaha mencari pekerjaan di luar negeri, dengan segala resiko yang dihadapi.

- Investasi
Upaya Pemerintah Daerah untuk meyakinkan negara-negara lain menanamkan investasinya di Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya di Kota Makassar ternyata belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh:

berbagai.....

Berbagai hambatan internal seperti:

- Proses perizinan yang masih berbelit-belit;
 - Birokrasi yang panjang;
 - Peraturan daerah dan Perundangan antar sektor yang tumpang tindih;
 - Masih seringnya terjadi unjuk rasa tenaga kerja;
 - Minimnya infrastruktur;
 - Belum adanya kepastian hukum untuk berusaha/berinvestasi;
 - Belum adanya jaminan keamanan (law enforcement yang lemah);
 - Iklim birokrasi yang masih belum bisa membebaskan dari dari praktek KKN;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dianggap tidak kompetitif hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya aksi unjuk rasa kelompok buruh yang menuntut perbaikan kesejahteraan.
- Hambatan eksternal
- Adanya persaingan antar Provinsi dalam menarik investasi ke daerahnya masing-masing, karena daerah-daerah luar pulau Jawa belum begitu menjanjikan untuk berinvestasi sehingga tidak menarik investor baik lokal maupun asing.

d)Sosial.....

d) Sosial Budaya

(1) Umum

Selama Tahun 2024 kehidupan manusia secara material relatif akan meningkat, namun secara moral spiritual masih terbatas pada segi peningkatan ritual, bukan pada aspek tata laku yang mencerminkan toleransi antar suku, antar golongan, antar pemeluk agama dan antar etnis;

(2) Agama

Pembangunan kehidupan beragama telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit. Belum lagi munculnya berbagai aliran kepercayaan yang berkedok agama yang banyak menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sebagian pemuka agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu khususnya politisasi agama untuk kepentingan partai politik dan kepentingan kelompoknya sehingga menimbulkan intoleransi baik antar umat seagama maupun antar umat beragama.

di wilayah.....

di wilayah Kota Makassar juga terjadi beberapa kejadian terkait adanya penolakan pembangunan rumah ibadah. Beberapa aliran kepercayaan yang ada dalam wilayah Polrestabes Makassar, meliputi:

- (a) Ahmadiyah;
- (b) Ahlul Bait An Nasir;
- (c) Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah;
- (d) Perguruan Islam;
- (e) Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI);
- (f) Aliran Syiah.

(3) Kesehatan

Dalam pembangunan kesehatan di Kota Makassar masih menghadapi berbagai penyakit menular seperti; tuberculosis paru, malaria, DBD, HIV/Aids dan penyakit menular lainnya, seperti baru-baru ini yaitu virus corona, serta berbagai penyakit tidak menular. Faktor penyebabnya antara lain:

- (a) pelayanan kesehatan oleh pemerintah sudah dapat menjangkau keseluruhan pelosok namun belum maksimal yang sulit akses transportasi maupun komunikasinya;
- (b) masih mahalnya pelayanan jasa kesehatan dan obat-obatan sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah;

(c) masih.....

- (c) masih belum membudayanya pola hidup sehat;
- (d) belum maksimalnya pelaksanaan program kesehatan gratis yang direncanakan oleh pemerintah dengan penggunaan kartu BPJS dan Kartu Indonesia Sehat, bahkan cenderung banyaknya pasien miskin yang terlantar di beberapa rumah sakit pemerintah yang tidak dilayani dengan berbagai alasan;
- (e) pemakai narkotika yang cenderung meningkat di berbagai kalangan dan telah memasuki di Kota Makassar pinggiran.

(4) Adat dan Budaya

Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang keluar dari nilai budaya bangsa antara lain:

- (a) Individualistis;
- (b) Materialistis;
- (c) Konsumtif;
- (d) Perilaku anarkis-destruktif;
- (e) Merosotnya nilai budi pekerti, kepedulian sosial, gotong royong, persatuan dan kesatuan bangsa;
- (f) Penggunaan narkoba di kalangan remaja;
- (g) Gaya hidup bebas;
- (h) Menurunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;
- (i) Menurunnya kesadaran masyarakat terhadap masalah keamanan.

(5) Pariwisata

Pembangunan pariwisata akan mampu menggali dan mengembangkan potensi pariwisata untuk menghasilkan devisa, meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan rasa cinta tanah air bagi seluruh rakyat Indonesia, serta melestarikan kekayaan dan keragaman budaya namun, sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran terhadap arti pentingnya pariwisata (sadar wisata) sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata terutama di daerah tujuan wisata belum optimal dan justru mengganggu kenyamanan wisatawan.

(6) Pendidikan

Pembangunan pendidikan telah ditunjang oleh kenaikan anggaran belanja pendidikan secara bertahap mendekati angka yang ditetapkan oleh UUD 1945, namun diperkirakan belum sepenuhnya mampu:

- (a) mengejar peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan secara menyeluruh;
- (b) menyediakan pelayanan pendidikan yang merata dan relatif murah;
- (c) memperkuat otonomi pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi keunggulan daerah serta membangun sekolah-sekolah kejuruan;
- (d) mengembangkan proses belajar mengajar yang berorientasi kepada kebutuhan peserta.....

peserta didik, dalam arti masih berorientasi pada pencapaian target materi dan nilai, kurang mempertimbangkan kreatifitas keterampilan dan kemampuan peserta didik, belum mampu membentuk karakter dan jiwa kebangsaan serta jiwa kejuangan;

- (e) meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang mendapat perhatian pemerintah;
- (f) tingginya anggaran pendidikan yang belum didukung dengan program dan pelaksanaan yang baik dalam pengelolaan anggaran sehingga menyebabkan tumbuhnya masalah baru berupa tindakan korupsi oleh kalangan penyelenggara pendidikan;
- (g) kurikulum yang berubah-ubah menyebabkan para siswa sulit untuk mengembangkan potensi diri.

(7) Olahraga

Pembinaan bidang olahraga di Kota Makassar telah terbina dengan baik meskipun dukungan anggaran untuk pembinaan olahraga belum maksimal karena keterbatasan dana, namun perhatian kepada atlet-atlet berprestasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta sudah cukup baik dengan pemberian penghargaan khususnya dalam bentuk-bentuk *financial*. Dalam mencari bakat-bakat atlet di berbagai cabang olahraga maka diselenggarakannya

PORDA (Pekan Olahraga Daerah).Kegiatan tersebut diselenggarakan setiap tahun selain pencarian bakat juga sebagai ajang silaturahmi antar Kabupaten/Kota melalui sarana olahraga.

(8) Lingkungan hidup

Tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam dengan lingkungan. Kebijakan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak kepada kegiatan eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum.

(9) Pertanahan

Pada awalnya, kasus pertanahan hanya merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat. Namun, dalam perkembangannya permasalahan pertanahan berkembang menjadi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat mengganggu stabilitas nasional yang penanganannya harus diselesaikan dengan hukum positif, sebagaimana saat ini banyak persoalan sengketa tanah yang menimbulkan berbagai konflik sosial yang berkepanjangan karena adanya kecenderungan pihak pemerintah tidak

melibatkan.....

melibatkan masyarakat dalam menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan persoalan tanah yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak puas masyarakat yang kemudian melakukan berbagai perlawanan dengan cara-cara anarkis serta pemaksaan khendak .

e) Keamanan

(1) kondisi keamanan

dapat dilihat dari gangguan kriminalitas, gangguan Kamtibcar Lantas, gangguan Kamtibmas bukan pidana dan keamanan situasi di wilayah. Khususnya di beberapa wilayah yang sering terjadi konflik, secara umum kondisi keamanan sudah semakin kondusif, namun di beberapa tempat tertentu masih terjadi tindakan main hakim sendiri, konflik horisontal yang di latar belakang berbagai hal, kekerasan dengan menggunakan berbagai senjata tajam termasuk senjata api serta kejahatan-kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat seperti maraknya kejahatan curas dan curat khususnya di Kota Makassar. Hal tersebut menggambarkan tentang kompleksitas permasalahan keamanan di suatu wilayah dengan penekanan khusus pada tantangan yang dihadapi Kota Makassar terkait kejahatan jalanan. Langkah-langkah strategis dan terkoordinasi diperlukan untuk mengatasi berbagai bentuk gangguan keamanan ini dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat.

(2)Kerawanan.....

(2) Kerawanan Kecamatan

Penentuan Tingkat kerawanan di Kecamatan adalah proses Multidimensional yang memerlukan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari berbagai sumber. dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan berbagai bentuk kerawanan. Informasi ini sangat krusial bagi pemerintah Kota, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan tindakan yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera. Dalam menentukan tingkat kerawanan daerah, didasarkan atas parameter karakteristik geografi, dinamika demografi dan akumulasi perkembangan lingkungan strategis serta potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dalam bentuk kejahatan/ kriminalitas, peristiwa non pidana seperti kecelakaan lalu lintas dan bencana alam, sebagai berikut:

NO	KESATUAN	THN 2023		THN 2024		TREND %		
		L	S	L	S	LAPOR		SELESAI
1	Polda Sulsel	1637	1735	1673	411	NAIK	36	2%
2	Restabes Mksr	7916	4922	9166	2951	NAIK	1250	16%

(a) Data Perkelahian kelompok yang terjadi di wilayah Kota Makassar selama tahun 2024 :

NO	KESATUAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Polda Sulsel												
2	Restabes Mksr	10	8	5	6	11	9	3	6	4	3		

(a) Perbandingan.....

- (b) Perbandingan data kasus menonjol tahun 2023 dan tahun 2024 di wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

NO	JENIS	T A H U N				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Aniaya Berat	107	36	56	23	26
2	Pembunuhan	13	7	10	10	9
3	Curat	395	239	447	977	491
4	Curas	226	146	132	236	196
5	Curanmor	239	104	138	466	493
6	Narkoba/Obat Keras					

- (c) Perbandingan lima jenis kejahatan tahun 2023 dan 2024 di wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

N O	JENIS KEJAHATAN	2023		2024		TREND -/+(%)		
		L	S	L	S	L		S
1	Konvensional	9099	4110	7791	4795	-1308	-14,38%	16,38%
2	Transnasional	0	0	0	0	0		
3	Kekayaan Negara	1	1	7	1	6	60,00%	-85,71%
4	Kontijensi	0	0	0	0	0		
	JUMLAH	9100	4111	7798	4796	-1302	-14,31%	16,33%

- (d) Data kasus Kecelakaan lalu lintas dua tahun terakhir di wilayah Polrestabes Makassar sebagai berikut

NO	JENIS KEJADIAN	2023	2024	TREND +/- (%)
1.	Jumlah Laka Lantas	1.484	1855	25,00%
2.	Penyelesaian Laka	1.385	1762	27,22%
3.	Korban :			
	MD	120	105	-12,50%
	LB	4	1	-75,00%
	LR	1.907	2274	19,24%
4.	Tabrak Lari	345	395	14,49%
5.	Kerugian Materil	Rp1.567.370.000,-	Rp1.806.430.000	Rp.239.060.000

(e) Data pelanggaran Lalulintas selama lima tahun terakhir 2020 s/d 2024 di Wilayah Polrestabes Makassar sebagai berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	SELESAI	DENDA
1.	2020	37.617	37.617	Rp. 907.450.000,-
2.	2021	20.821	20.821	Rp. 2.279.388.000,-
3.	2022	6.288	5.866	Rp. 289.550.000,-
4.	2023	13.132	9.069	Rp. 790.159.000,-
5.	2024	16.357	11.835	Rp. 592.150.000,-

(f) Data Crime Cleared selama periode lima tahun terakhir 2020 s/d 2024 di Wilayah Polrestabes Makassar sebagai berikut :

N O	TAHUN	CRIME TOTAL	CRIME CLEARED
1.	2020	4.297	3.154
2.	2021	2.684	2.118
3.	2022	4.335	2.398
4.	2023	9.406	4.368
5.	2024	7.798	4.796

e) Data kecelakaan Lalulintas selama lima tahun terakhir 2020s/d2024 di daerah Hukum Polrestabes Makassar sebagai berikut:

N O	TAHUN	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN			
			MENINGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN	MATERIIL
1	2020	1.300	100	8	1.607	Rp.2.122.970.000,-
2	2021	973	97	2	1.186	Rp.1.528.600.000,-
3	2022	1.090	121	5	1.277	Rp.1.678.825.000,-
4	2023	1.484	120	4	1.907	Rp.1.567.370.000,-
5	2024	1.855	105	1	2.274	Rp.1.806.430.000,-

41 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTABES MKS
NOMOR : KEP/ 77 /VII/2025
TANGGAL : 18 JULI 2025

- (g) Perbandingan pelanggaran lalu lintas 2023 dan 2024 di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar disusun sebagai berikut :

N O	JENIS KEJADIAN	2023	2024	TREND -/+ (%)
1.	Jumlah Pelanggaran	13.312	16357	24,56%
2.	Tilang	9.069	9069	11835
3.	Non Tilang	4.243	4522	279
4.	Denda	Rp. 544.650.000,-	Rp. 592.150.000,-	Rp. 47.500.000,-

(3) Terorisme

- (a) Detasemen Khusus 88 berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku teror bom khususnya di Kota Makassar yang mana keberhasilan ini membuka berbagai skenario tentang perkembangan jejaring teror di Kota Makassar. Skenario ini penting dibangun untuk menentukan arah strategi kontra teror di Kota Makassar. Skenario terbaik yang bisa dibayangkan adalah bahwa jaringan terorisme juga akan terus berkembang di Wilayah hukum Polrestabes Makassar mengingat eks konflik (Poso Sulteng) dan menjadi tempat pelarian kelompok teroris, akan terus ada dengan merekrut generasi muda dari berbagai kalangan/profesi dan saat ini segala kalangan dan profesi termudah dipengaruhi. Semua anggota jejaring diperkirakan akan mengalami proses demoralisasi apabila ada kawan mereka yang tertangkap namun tidak menurunkan semangat jihad yang dianut.

Jejaring

Jejaring teror di Kota Makassar akan terus melakukan revitalisasi jejaring dan semakin memperluas ruang gerak ke berbagai daerah khususnya daerah- daerah yang dianggap aman untuk mengembangkan jaringannya dan melakukan aksi. Namun demikian strategi kontra radikal harus terus dibangun untuk mengantisipasi skenario terburuk. Skenario terburuk yang bisa dibangun adalah terjadinya proses metamorfosis jejaring di wilayah hukum Polrestabes Makassar sehingga akan menghadapi ancaman teror dengan tingkat eskalasi lebih tinggi dan lebih luas mengingat sudah banyaknya anggota pelaku teroris yang ditangkap di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

- (b) Metamorfosis teror di wilayah hukum Polrestabe Makassar akan diawali suatu aksi retaliasi atas tertangkapnya pelaku-pelaku teror oleh aparat Polri. Aksi retaliasi ini merupakan balas dendam sekaligus pembuktian bahwa jejaring tetap bisa bertahan meskipun dilakukan penangkapan secara terus menerus.
- (c) Revitalisasi Jejaring teror tampaknya akan terus berkembang sekaligus menjadi kemunculan kelompok-kelompok teror baru yang merupakan perkembangan dari kelompok teror yang sudah ada dimana dalam perkembangannya kelompok ini Update tanggal 31 Desember 2024 eks Napiter yang sudah bebas di wilayah Sulsel mengalihkan sasarannya yang semula ketempat-tempat kumpul massa

Menjadi.....

menjadi ke kantor-kantor pemerintah,
Mako-mako Polri, aparat Polri dan pejabat
Publik lainnya.

- (d) Update tanggal 31 Desember 2024 eks
Napiter yang sudah bebas di wilayah
Makassar sebanyak 69 orang.

b. Analisis Perkembangan Situasi Daerah di Kota Makassar

Pelaksanaan tugas Polrestabes Makassar dalam memelihara keamanan dan keteriban masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Saat ini Polrestabes Makassar memiliki personel yang sudah tergelar di Polsek Jajaran dan didukung oleh sarana prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam penilaian evaluasi AKIP tahun 2024 Polrestabes Makassar mendapat kategori BB (73,69) atau Sangat Baik hal ini akan berdampak ke depan pada pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar lewat terdukungnya pemenuhan prasarana. Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Meningkatnya trend 5 jenis kejahatan dan pelanggaran (HAM, Hukum Pidana, TP Ringan) dua tahun terakhir (2023-2024) jumlah laporan mengalami kenaikan
sebesar.....

sebesar 32,69% dan selesai sebesar 43,80% menuntut Polrestabes Makassar untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi Masalah

Seiring dengan perkembangan tren otomasi teknologi di era disrupsi masa dimana terjadi perubahan dan inovasi secara masif menjadikan tugas Polri ke depan khususnya Polrestabes Makassar dalam perkembangan lingkungan strategi nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polrestabes Makassar dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polrestabes Makassar yang semakin tinggi dalam mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 pada “Transformasi menuju Polri yang Presisi” guna mendukung mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu, mengharuskan Polrestabes Makassar menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan kebijakan prioritas nasional pemerintah tahun 2026 di bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) khususnya pada pembangunan stabilitas keamanan dan ketertiban pada bidang kamtibmas di wilayah Kota Makassar secara umum. Permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polrestabes Makassar pada Tahun 2026 berdasarkan hakekat ancaman yang tertuang dalam Kirka Intel Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

3. Potensi Gangguan

- 1) Letak geografis daerah hukum Polrestabes Makassar Bila mencermati keadaan letak geografis Wilayah hukum Polrestabes Makassar yang memiliki luas 167,84KM² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten lain serta terdapat kepulauan, laut dan sungai tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan antara lain: Bencana Alam, Banjir dan Laka lantas;

2) kondisi.....

- 2) Kondisi Kota Makassar yang merupakan jalur lalu lintas dan pusat perekonomian di kawasan Indonesia Timur sehingga memiliki peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain sangat potensial dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu khususnya kelompok pelaku kejahatan/teroris untuk melakukan penyelundupan senjata api dan bahan peledak bahkan dimungkinkan tindakan subversi asing di bidang ideologi, politik, sosial ekonomi dan keamanan walaupun hingga saat ini belum ditemukan indikasi beroperasi di Indonesia termasuk di wilayah Polrestabes Makassar;
- 3) Wilayah Kota Makassar yang dikelilingi oleh laut serta terdapat pulau yang akan menjadi tantangan bagi tugas pokok Polri khususnya di Polrestabes Makassar, disisi lain akan mendukung/menguntungkan para pelaku tindak kriminalitas dalam melancarkan aksi-aksi kejahatan. Selain itu letak pulau Sulawesi yang berdekatan garis Khatulistiwa sehingga rentan terjadinya bencana alam baik berupa gempa bumi, banjir, angin putingbeliung dan kekeringan;
- 4) Tingginya curah hujan Kota Makassar mengakibatkan potensi bencana alam banjir semakin besar;
- 5) Belum tercapainya keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk + 0,99% per tahun dengan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, mengakibatkan tingginya angka pengangguran sehingga akan berpengaruh secara signifikan terhadap semakin meningkatnya volume kejahatan baik kuantitas maupun kualitasnya;
- 6) Keanekaragaman suku dengan berbagai macam adat istiadat dan temperamennya, perbedaan agama dan perbedaan kemampuan ekonomi, merupakan salah satu

faktor.....

faktor munculnya ketegangan dan kecemburuan sosial yang dapat mengarah pada permasalahan SARA. Keberagaman budaya, etnis, agama, suku dan ras di satu sisi merupakan aset bangsa, namun apabila pemerintah kurang memperhatikan adanya perbedaan tersebut, cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan tersebut, antara lain terjadinya konflik horizontal atau vertikal;

- 7) Mata pencaharian penduduk Kota Makassar yang mayoritas petani dan nelayan sehingga tingkat pendapatan perkapita masih rendah sehingga akan mendorong untuk melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku demi memenuhi kebutuhan hidup seperti memproduksi minuman keras (ballo) sebagai salah satu upaya menambah pendapatan;
- 8) Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, perkembangan jumlah penduduk yang cepat, penyebaran dan kepadatan yang tidak merata, serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan dimensi yang kompleks dan luas, antara lain meningkatnya premanisme, gelandangan dan pengemis, *street crime* dan lain-lain;
- 9) Sumber daya alam merupakan potensi yang mendorong laju pembangunan yang merupakan sumber pendapatan pemerintah dan masyarakat yang besar. Hal ini tentunya mengundang kerawanan dalam hal pengelolaan dan eksploitasinya bilamana sistem pengawasan dari pemerintah tidak dilakukan secara profesional;

10)potensi.....

- 10) Potensi hutan yang sedemikian luas/melimpah dan kurangnya pengawasan petugas terkait menimbulkan kerawanan akan terjadinya penebangan liar, pencurian, pembakaran dan perambahan hutan yang dapat merusak ekosistem lingkungan;
- 11) Bergulirnya issue kebebasan HAM dan kebebasan berdemokrasi termasuk kebebasan seseorang dalam menganut ideologi, berakibat kepada berkembangnya wacana, diskusi, penyebaran paham/ideologi lain selain Pancasila seperti liberalisme, komunisme, Syariat Islam dan ideologi lain dalam bentuk pertemuan terbuka maupun melalui mass media. Kondisi tersebut mengandung kerawanan terhadap eksistensi Pancasila serta akan mengundang reaksi masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal;
- 12) Kebijakan Pemerintah yang sering kali menimbulkan kontroversi dan dinilai tidak mengakomodasi kepentingan rakyat berdampak timbulnya reaksi dan aksi penolakan dengan mobilisasi massa serta mengarah ke tindakan anarkis;
- 13) Belum tuntasnya pengaturan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, mengakibatkan terjadinya tarik-menarik kewenangan antara daerah dengan pusat yang berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan kerawanan di daerah;
- 14) Dengan kondisi struktur politik Indonesia yang memiliki lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara berpotensi pada:
 - 1) Masih adanya praktek korupsi yang sukar terungkap melalui pengadilan;
 - 2) Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada

kepentingan pribadi, tanggung jawab badan/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan yang memadai;

- 3) Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- 15) Kondisi budaya politik yang belum sesuai dengan demokrasi yang benar berpotensi menimbulkan gangguan yang disebabkan:
 - a) Adanya kelompok yang tidak siap kalah, tetapi hanya siap menang dalam pertarungan politik;
 - b) Peran media massa baik cetak maupun elektronik dan kebebasan pers tumbuh dan berkembang, namun belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak bertanggung jawab terhadap akibat pemberitaan dan menguntungkan pihak tertentu.
- 16) Dengan kondisi proses politik yang diwarnai oleh menguatnya dominasi Dewan Pengurus Pusat Parpol terhadap wakil rakyat maupun Elite Politik, kondisi tersebut menyebabkan asas mufakat yang merupakan amanat Pembukaan UUD 1945 semakin terabaikan, yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus Parpol daerah sehingga berpotensi munculnya konflik internal partai yang berkepanjangan;
- 17) Rencana pemberlakuan Syariat Islam di Kota Makassar yang dipelopori oleh KPPSI Kota Makassar, masyarakat, LSM dan Organisasi Ideologi garis keras masih akan terus diperjuangkan baik melalui jalur formal maupun informasi dengan pemberlakuan Syariat Islam di Kota Makassar oleh KPPSI, masyarakat, LSM, dan organisasi

ideologi.....

ideologi garis keras merupakan isu yang kompleks dengan implikasi yang luas. Upaya melalui jalur formal dan informal menunjukkan keseriusan para pendukungnya. Namun, tantangan besar menghadang terkait aspek hukum, keberagaman masyarakat, interpretasi Syariat Islam, hak asasi manusia, dan potensi instabilitas sosial politik. Proses ini akan terus menjadi perhatian publik;

- 18) Pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar menunjukkan adanya peningkatan yang ditandai dengan peningkatan jalur lalu lintas perekonomian di kawasan timur Indonesia sehingga memberikan peluang kepada investor dalam dan luar negeri untuk mengembangkan usaha dan menanamkan modalnya di wilayah Kota Makassar. Disisi lain kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan, pelanggaran, manipulasi di bidang ekonomi serta yang dapat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak luas pada kehidupan ekonomi masyarakat;
- 19) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di satu pihak akan membuka isolasi daerah lainnya namun di lain pihak akan meningkatkan terjadinya kasus penyelundupan serta kasus kriminalitas dengan modus operandi baru dan mobilitas tinggi;
- 20) Pembangunan nasional secara fisik akan membawa dampak kemajuan dan perkembangan daerah yang juga membawa dampak peningkatan pendapatan di kalangan masyarakat namun masalah pembebasan ganti rugi tanah untuk kepentingan pembangunan tidak jarang menimbulkan masalah yang sering dihadapi
;

21)penambahan.....

- 21) Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan akan menimbulkan berbagai masalah lalu lintas khususnya di wilayah Kota Makassar;
- 22) Adanya aliran-aliran yang mengajarkan ajaran Agama yang tidak sesuai dengan ajaran yang telah diakui oleh negara sehingga dapat menimbulkan adanya selisih paham antar umat beragama yang pada akhirnya akan mengarah ke tindakan main hakim sendiri dan anarkhis;
- 23) Kasus-kasus pemogokan/kerusuhan buruh dengan menuntut kenaikan upah/tunjangan, masalah PHK juga perlu mendapat perhatian dan penanganan tuntas guna mencegah kerawanan sosial;
- 24) Terjadinya perkelahian pelajar/mahasiswa, yang cenderung menggunakan cara-cara yang anarkhis dengan menggunakan senjata rakitan/senjata tajam yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- 25) Masalah hiburan malam masih mendapat sorotan karena dinilai sebagai pelecehan budaya daerah dan menimbulkan keresahan masyarakat terutama dari tokoh-tokoh Agama dan kelompok-kelompok Eks FPI dan Eks HTI;
- 26) Tinggi tingkat pengangguran dan putus sekolah menjadi salah satu pemicu terjadi berbagai aksi kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan secara berkelompok seperti kelompok geng motor/begal yang makin marak;
- 27) Kesenjangan sosial yang semakin melebar dan tidak kunjung teratasi akan menimbulkan kekerasan dan ketidakpercayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai sikap dan aksi-aksi emosional yang mengarah ke masalah SARA;

28) masalah.....

- 28) Masalah tanah bagi masyarakat merupakan bagian dari kehidupan yang memiliki aspek ekonomis dan ikatan adat serta budaya. Dengan meningkatnya nilai ekonomis dari tanah sebagai akibat hasil pembangunan yang menjadikan semakin sempitnya lahan, maka potensi kerawanan yang timbul seperti : status tanah yang tidak jelas, tanpa surat dan dokumen yang asli, penyerobotan tanah, masalah ganti rugi tanah karena untuk proyek pembangunan bahkan unjuk rasa yang terkait dengan masalah tanah yang mengarah ke tindakan anarkis;
- 29) Permasalahan–permasalahan di bidang keamanan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, meliputi
- a) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dalam menangani masalah keamanan, masyarakat bertindak main hakim sendiri;
 - b) Sebagian masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan segalanya dapat diatur dan ditentukan adat setempat sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal;
 - c) Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan;
 - d) pelanggaran tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku;
 - e) Tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah;
 - f) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik permasalahan yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya akan berdampak pada masalah keamanan.

- 30) Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi selain dilatarbelakangi oleh dorongan kebutuhan hidup, perbedaan taraf hidup yang menyolok, pengaruh adat dan kebiasaan yang tidak wajar seperti minuman keras, penerapan budaya SIRI yang tidak pada tempatnya maka diperkirakan kualitas dan kuantitas kasus Kamtibmas akan lebih meningkat situasi ini akan menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota Besar Makassar;
- 31) Kasus perkelahian kelompok dengan menggunakan sajam dan senpi rakitan baik yang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa masih saja terjadi, salah satu pemicunya disebabkan mulai dari minuman keras, kesalahpahaman, kecemburuan sosial, balas dendam hingga ke permasalahan pribadi yang diangkat menjadi permasalahan kelompok;
- 32) Masih adanya indikasi dan gejala-gejala yang kurang menguntungkan dalam membina disiplin dan kerukunan antar anggota TNI/POLRI, sehingga memungkinkan masih terjadinya kesalahpahaman akibat jiwa korsa yang berwawasan sempit;
- 33) Gangguan Kamtibmas yang secara kualitas dan kuantitas semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dimana beberapa kejahatan sudah memanfaatkan teknologi maju seperti maraknya *cyber crime* dan pembobolan kartu kredit dan tabungan lewat internet dimana perangkat hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat menjangkau/mengungkap kejahatan tersebut, demikian pula kejahatan berdimensi baru antara lain *white colour crime, Illegal Logging*, Perjudian, Narkoba, *Money*

Laundry, Korupsi dan kejahatan terorganisir masih diperkirakan akan mengganggu stabilitas kamtibmas;

34) Permasalahan yang cenderung berpotensi mengarah pada kontijensi di dalam masyarakat antara lain:

- a) Kasus-kasus intoleransi yang berkembang sehingga menimbulkan kegaduhan politik disertai aksi saling lapor, penyebaran berita-berita bohong melalui media sosial akan menjadi trend dan cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan politik oleh kelompok-kelompok tertentu;
- b) Sengketa lahan/tanah antara masyarakat dan perusahaan yang melibatkan pengamanan dari aparat keamanan (Polri) yang disikapi secara luas melalui pemberitaan media massa dan seluruh elemen masyarakat dengan dugaan pelanggaran HAM oleh anggota Polri;
- c) Kerusuhan sosial dan anarkis massa termasuk aksi unjuk rasa yang anarkhis sebagai akibat masalah sosial, budaya dan SARA;
- d) Kejahatan pelaku massal meliputi penjarahan, pengrusakan dan pembakaran;
- e) Kejahatan pelaku massal sebagai dampak dari kejahatan yang meliputi perbankan, industri, perdagangan, moneter dan lingkungan hidup;
- f) Kejahatan bersenjata dengan mobilitas tinggi;
- g) Bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Kejahatan berupa teror bom dan peledakan bom;
- i) Proses Pemilihan Kepala Daerah yang tidak transparansi yang memicu kemarahan massa.

35) peningkatan.....

35) Peningkatan kedatangan Orang asing baik dalam rangka kunjungan kerja, kunjungan usaha maupun kunjungan wisata merupakan suatu kerawanan tersendiri sehingga diperlukan tingkat kewaspadaan yang prioritas terhadap kemungkinan timbulnya permasalahan/kasus yang melibatkan Orang Asing seperti:

- a) Pemalsuan/penyalahgunaan dokumen keimigrasian;
- b) Pelanggaran izin kerja;
- c) Pelanggaran izin penelitian;
- d) Imigran gelap;
- e) Sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

b. Ambang Gangguan

1) Ambang gangguan yang bersumber dari kondisi Geografi.

a) Wilayah yang berbatasan dengan Provinsi tetangga:

- 1) Kab. Gowa;
- 2) Kab. Maros;

b) Wilayah Perairan yang rawan penyelundupan:

- 1) Perairan kota Makassar.

c) Lokasi rawan kebakaran:

- 1) Kec. Bontoala;
- 2) Kec. Tallo;
- 3) Kec. Mariso;
- 4) Kec. Makassar;
- 5) Kec. Biringkanaya;
- 6) Kec. Manggala.

d) Daerah rawan banjir dan tanah longsor:

- 1) Kec Biringkanaya;
- 2) Kab. Tamalanrea;
- 3) Kec. Manggala;
- Kec. Panakkukang
- Kec. Tallo

c.Ambang.....

c. Ambang Gangguan yang berkaitan dengan kalender Kamtibmas.

- 1) Peringatan Hari Besar Internasional:
 - Peringatan Hari Bumi Internasional tgl (22 April);
 - Peringatan Hari Buruh Internasional (*May day*, 1 Mei);
 - Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (9 Desember);
 - Peringatan Hari HAM Sedunia (10 Desember).
- 2) Peringatan Hari Besar Nasional:
 - a) Hari-hari besar keagamaan:
 - (1) Hari raya Idul Fitri;
 - (2) Hari raya Idul Adha;
 - (3) Hari Raya Natal dan Tahun Baru;
 - (4) Hari Raya Nyepi;
 - (5) Hari Raya Waisak;
 - (6) Hari Imlek (tahun baru China).
 - b) Hari Pendidikan Nasional;
 - c) Hari Kebangkitan Nasional;
 - d) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI;
 - e) Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
 - f) Hari Pahlawan.
- 3) Agenda Kegiatan Pemerintah (Pusat / Daerah):
 - a) Sidang-sidang/konferensi yang dihadiri pejabat negara/Menteri negara-negara asing/sahabat;
 - b) Sidang-sidang DPR/DPD/MPR;
 - c) Sidang-sidang yang dihadiri pejabat negara;
 - d) Sidang DPRD Prov/Kab/Kota.
- 4) Agenda kegiatan partai politik dan Ormas Peringatan HUT Parpol/Ormas;
- 5) Agenda kegiatan LSM:
 - a) Seminar;
 - b) Lokakarya;
 - c) Dialog;
 - d) Unjuk rasa;

6) Hari.....

- 6) Hari Peringatan Peristiwa Pelanggaran HAM:
 - a) Kasus Trisakti (12 Mei);
 - b) Peristiwa Semanggi I (13 Nopember);
 - c) Peristiwa Semanggi II (24 September);
 - d) Peristiwa Tanjung Priok (12 September_d);
 - 7) Hari Peringatan Peristiwa Tragedi:
 - a) Tragedi Amarah (24 April);
 - b) Tragedi Memar (1 Mei).
- d. Ambang Gangguan yang berkaitan dengan lokasi tertentu.
- 1) Lokasi gedung-gedung simbol kenegaraan:
 - a) Rumah Kediaman Pejabat Diplomat asing;
 - b) Gedung DPRD Prov/Kab/Kota;
 - c) Kantor Gubernur /Bupati/Walikota;
 - d) Mako TNI/Polri.
 - 2) Lokasi Objek-Objek Vital Nasional dan Objek tertentu:
 - a) Kantor KPU/Bawaslu;
 - b) Bandar Udara internasional/Nasional;
 - c) Pelabuhan Laut internasional/Nasional;
 - d) Kantor bank pemerintah/swasta;
 - e) Kantor pemerintah Prov/Kab/Kota;
 - f) Terminal Prov/Kab/Kota;
 - g) Stasiun TVRI/RRi;
 - h) PLN;
 - i) Depo Pertamina/SPBU;
 - j) Proyek PLTU Tello Makassar;
 - 3) Lokasi Sentra industri dan perdagangan:
 - a) Mall/Supermaket;
 - b) Pabrik-pabrik;
 - c) Pusat Pasar-pasar Modern;
 - d) Pusat Pasar-pasar tradisional

- 4) Lokasi Obyek wisata
 - a) Tanjung Bunga;
 - b) Tanjung bayang;
 - c) Lokasi Rekreasi lainnya.
- 5) Peninggalan sejarah, meliputi:
 - a) Benteng Fort Rotterdam;
 - b) Lokasi Makam Pejuang Nasional.
- e) Gangguan Nyata

Bentuk-bentuk gangguan nyata yang diperkirakan akan dapat terjadi pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1) Kejahatan Konvensional:

a). Curat dan Curanmor

Jenis kejahatan ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu dengan tidak mengenal strata sosial sasaran, akibat perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti pengangguran, kemiskinan dan kebutuhan hidup yang semakin sulit pemenuhannya maupun problem sosial kemasyarakatan lainnya.

b) Curas

Jenis kejahatan ini perlu diwaspadai perkembangannya yang cenderung makin meluas di berbagai daerah, baik di pinggiran kota bahkan beberapa desa, wilayah industri dan perkantoran serta pemukiman kota yang padat penduduk. Bahkan pada akhir-akhir ini cenderung meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, dimana para pelaku menggunakan senjata api/senjata tajam dan dalam melakukan aksinya tidak segan-segan bertindak sadis dengan melukai bahkan membunuh korban. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat

pengangguran.....

pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja pengaruh gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif serta pengaruh sosial lainnya.

c) Kejahatan jalanan (*street Crime*).

Dengan meningkatnya pengangguran, gelandangan dan pengemis yang dibarengi dengan semakin menurunnya nilai-nilai di masyarakat terutama di kota-kota besar menyebabkan berkembangnya kejahatan jalanan, antara lain premanisme, pemerasan, penodongan, perampasan/penjabretan, pencopetan dan geng motor/begal dengan tujuan mempercepat memperoleh pendapatan/uang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk berfoya-foya.

d) Penipuan dan penggelapan

Jenis kasus-kasus tersebut di atas merupakan modus operandi kejahatan yang sering terjadi khususnya terkait dengan hubungan bisnis yang mana penipuan dan penggelapan tersebut ada yang memang direncanakan sejak awal namun ada pula yang terjadi secara spontan dalam rangka untuk memperoleh harta yang cepat serta untuk memenuhi kebutuhan hidup.

e) Perjudian

Kejahatan perjudian merupakan kejahatan yang menjadi sorotan tajam masyarakat khususnya di Kota Makassar yang mana kejahatan perjudian ini seringkali dianggap sebagai budaya dari satu kelompok masyarakat sehingga giat perjudian tersebut dianggap legal dan tidak melanggar hukum, yang mana kejahatan ini menyebabkan meningkatnya gangguan kamtibmas lainnya yang meresahkan masyarakat.

f) penganiayaan.....

f) Penganiayaan Berat

Kasus ini kerap terjadi di semua strata masyarakat di Kota Makassar yang mana lebih banyak disebabkan karena hal sepele, yang didorong oleh rasa emosional yang tidak terkendali akibat berbagai permasalahan kehidupan serta penjabaran budaya Siri yang keliru.

g) Kecelakaan Transportasi.

Kasus kecelakaan transportasi melibatkan penggunaan alat angkut darat, alat angkut laut dan alat angkut udara. Namun yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun adalah kasus kecelakaan lalu lintas angkutan darat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan, yang tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan. Selain itu tingkat kepatuhan masyarakat pengguna jalan terhadap peraturan di bidang lalu lintas masih relatif rendah.

h) Kejahatan penyerobotan tanah dan sengketa tanah.

Akhir-akhir ini berbagai kasus persoalan tanah semakin marak bahkan akibat permasalahan tanah menjadi konflik horizontal yang berkepanjangan yang menyebabkan jatuhnya korban salah satu sebab banyaknya timbul permasalahan tanah adalah tidak tertibnya sistem penerbitan sertifikat tanah, tidak jelasnya batas tanah serta meningkatnya harga ekonomis tanah mengakibatkan semakin banyaknya kasus penyerobotan dan sengketa tanah yang terjadi yang mana saat ini kasus sengketa tanah telah menjadi sumber terjadinya berbagai gangguan kamtibmas lainnya seperti pengrusakan, penganiayaan dan pembunuhan serta berbagai konflik sosial di masyarakat.

i) penyalahgunaan.....

i) Penyalahgunaan Senpi dan Handak.

Kasus penyalahgunaan Senpi dan Handak masih terjadi, terutama pada daerah rawan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak *illegal* dan kasus-kasus kejahatan lainnya seperti perampokan dan terorisme. Semakin mudahnya memperoleh bahan-bahan pembuatan Senpi dan Handak semakin manambah maraknya perakitan senpi dan handak baik untuk digunakan melakukan teror maupun dilakukan untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya.

4. Kejahatan *Trans National Crime*.

Terorisme.

Terorisme adalah merupakan kejahatan yang berdampak sangat luas terhadap semua kehidupan masyarakat. Kejahatan ini cenderung semakin meningkat eksistensinya meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pihak-pihak terkait namun karena penggunaan dalil agama khususnya Islam semakin banyak orang yang terpengaruh dan pengkaderannya terus berlangsung meskipun secara terselubung selain itu karena beberapa tokoh dari kelompok pelaku teroris yang belum tertangkap, selain itu mereka yang akan bebas dari penjara berpotensi kembali bergabung dan melakukan aksi-aksi teror.

b) Kejahatan Narkotika/Psikotropika (*illicit drugs trafficking*).

Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba belum menyentuh semua jaringan pelaku hingga ke akar-akarnya, sehingga kejahatan narkoba masih merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, saat ini Kota Makassar dan telah menjadi pasar perdagangan narkoba baik nasional maupun

internasional

internasional. Pemberantasan narkoba masih dihadapkan pada berbagai persoalan antara lain adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum, sindikat yang terorganisir, sanksi hukum yang ringan serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba. Keuntungan finansial yang cukup besar menggiurkan banyak kalangan untuk terlibat dalam giat peredaran narkoba baik sebagai bandar, pengedar maupun sebagai kurir dan saat ini kejahatan narkoba telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa-desa di seluruh Kab/Kota.

c) Perdagangan Manusia (*Trafficking in person*).

Perdagangan manusia dilakukan oleh mafia/sindikat internasional yang terorganisasi. Pelaku memiliki mobilitas tinggi sehingga mampu menjangkau batas antar negara. Kejahatan ini sering melibatkan orang asing sehingga tidak jarang dapat mengganggu hubungan bilateral dan stabilitas keamanan nasional, selain itu kejahatan ini menggunakan modus operandi berkedok pengiriman TKI dimana perekrutan dan penempatan calon TKI, masih di dominasi oleh calo, tidak jarang dengan cara menyalahi prosedur, seperti manipulasi memalsukan dokumen. maraknya kejahatan perdagangan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor namun yang dominan adalah karena kurangnya lapangan kerja khususnya dalam negeri sehingga orang berbondong-bondong mencari kerja ke luar negeri yang rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan kejahatan perdagangan orang.

d) Pengiriman TKI Ilegal

Perekrutan dan penempatan calon TKI, masih didominasi oleh calo, tidak jarang dengan cara

menyalahi.....

menyalahi prosedur, seperti manipulasi atau memalsu dokumen. Faktor utama penyebab maraknya penempatan TKI secara ilegal adalah mahal dan rumitnya birokrasi pengurusan penempatan TKI di luar negeri selain itu susahnyalah lapangan kerja menyebabkan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk menjadi TKI dengan iming-iming gaji yang cukup besar.

e) Pencucian uang (*money Laundering*).

Pencucian uang melalui kegiatan investasi langsung seperti sektor properti, asuransi, perbankan dan pasar modal dimungkinkan terjadi sebagai akibat masih lemahnya pengawasan lalu lintas uang yang masuk dengan melibatkan oknum-oknum tertentu untuk mengatur masuknya uang hasil kejahatan.

f) Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*)
Penyelundupan senjata api dan amunisi terutama dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan RI khususnya untuk mendukung perjuangan kelompok teroris didalam negeri serta daerah konflik seperti Poso dan Papua.

g) Imigran Gelap.

Banyaknya imigran gelap yang berasal dari Timur Tengah dan atau Asia yang menuju Australia dengan menggunakan kapal laut melalui perairan Indonesia terutama Selat Makassar, namun karena berbagai sebab akhirnya menjadi imigran gelap di Indonesia khususnya di Kota Makassar, menjadi persoalan tersendiri terlebih lagi para imigran tersebut seringkali melakukan pelanggaran dan tidak berdisiplin dengan aturan yang ada dan jumlahnya yang semakin hari juga semakin

meningkat.....

meningkat serta tidak adanya kejelasan mereka akan dikemanakan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan tersendiri yang memerlukan perhatian khusus karena imigran gelap tersebut terpantau oleh dunia internasional.

h) **Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber crime*)**

Pelaku aksi *Cyber Crime* dengan menggunakan *hacker* dan berbagai teknologi canggih. Kejahatan ini diperkirakan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan akan berpengaruh terhadap kepentingan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

i) **Penyelundupan.**

Penyelundupan berbagai komoditas bahan pokok baik itu beras, gula daging, buah-buahan maupun barang-barang lainnya menyebabkan terjadinya stagnasi perdagangan yang merugikan petani dan pemasukkan ke kas negara serta dikuasainya pasar oleh importir nakal.

3) **Kejahatan terhadap kekayaan negara**

a) **Korupsi**

Terjadinya kerugian keuangan negara disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan dan pengontrolan oleh Pemerintah, disamping itu kegiatan tindak pidana korupsi biasanya dilakukan secara kolektif yang melibatkan banyak pihak (mulai dari atasan sampai dengan bawahan) sehingga dalam pemberantasan korupsi akan terasa sulit karena telah terjadi suatu sistem yang saling terkait dan rapi serta telah berlangsung sekian lama dan telah dianggap sebagai hal yang biasa.

b) penggelapan....

b) Penggelapan pajak sarana dan prasarana

Tingginya tingkat pelanggaran ketentuan dan peraturan dibidang perpajakan disamping memperkecil penerimaan negara, telah mengakibatkan persaingan tidak sehat di dunia usaha. Pengawasan dan sistem administrasi serta sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan yang lemah akan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya penggelapan dan manipulasi pajak selain itu keterlibatan orang dalam untuk menggelapkan pajak-pajak perusahaan besar cukup besar dengan terbongkarnya beberapa kasus penggelapan pajak oleh pegawai pajak sendiri karena masyarakat umum tidak begitu memahami berbagai prosedur perpajak dan apa yang ditetapkan oleh pemerintah itu saja yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat.

c) Pencemaran dan kerusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri. Berbagai giat pengelolaan limbah yang tidak tetap mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak pada timbulnya berbagai macam jenis penyakit pada masyarakat serta menurunnya tingkat produksi berbagai komoditi pertanian.

d) Penyelewengan Distribusi BBM

Penyelewengan distribusi BBM subsidi khususnya ke industry dan ke luar negeri terjadi karena adanya perbedaan harga yang cukup signifikan sehingga akan memberi keuntungan yang besar bagi para pelaku selain itu adanya oknum-oknum pihak Pertamina sendiri yang memberi peluang kepada pihak-pihak pemodal besar untuk memperoleh keuntungan selain

itu.....

itu belum maksimalnya pengawasan khususnya di jalur-jalur distribusi BBM keluar negeri didukung pula dengan mental aparat yang masih mudah terpancing dengan keuntungan finansial.

e) **Penyelewengan Distribusi pupuk bersubsidi**

Penyelewengan ini terjadi karena perbedaan harga harga pupuk bersubsidi dengan non subsidi cukup besar, selain itu pada musim tanam kebutuhan akan pupuk sangat besar, yang dimanfaatkan spekulan dengan menjual pupuk dengan harga tinggi.

4) **Kejahatan berimplikasi kontinjensi**

a) **Kontinjensi Keamanan**

(1) **Perkelahian antar suku.**

Adanya perbedaan kultur, kecemburuan sosial dan perasaan dendam yang berlebihan adalah merupakan penyebab terjadinya perkelahian antar suku. Apabila pertikaian antara suku tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan tuntas, dikhawatirkan dapat memicu timbulnya konflik horizontal yang berpengaruh terhadap stabilitas keamanan secara menyeluruh. Perkelahian antar suku ini dipicu pula dengan adanya rasa kecemburuan khususnya apabila suku pendatang lebih sukses dari pada suku penduduk asli sehingga akan mudah terprovokasi apabila ada sedikit permasalahan.

(2) **Perkelahian antar kelompok.**

Kasus perkelahian antar kelompok/kampung yang disebabkan karena rasa solidaritas kesukuan yang sempit dan adanya perasaan dendam dapat memicu kasus-kasus sepele dan kesalahpahaman menjadi

perkelahian.....

perkelahian massal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang mana perkelahian tersebut dapat terjadi secara berulang-ulang dan dilakukan secara anarkis seperti melakukan pembakaran, pengrusakan, penganiayaan sampai pada pembunuhan.

(3) Perkelahian antar kelompok Mahasiswa

Kasus perkelahian antar kelompok mahasiswa seringkali kali terjadi baik antar fakultas dalam satu PTN/PTS maupun antar PTN/PTS disebabkan karena rasa solidaritas yang sempit dan adanya perasaan dendam yang sifatnya pribadi namun membawa-bawa nama kelompok/suku/organisasi selain itu adanya provokasi dari kelompok tertentu sehingga dapat memicu terjadinya kesalahpahaman dan menjadi perkelahian massal yang anarkis yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat maupun di dalam kampus maupun antar kampus.

b) Kontinjensi Sosial

(1) Pengrusakan Tempat Ibadah

Fanatisme agama yang sempit dan adanya provokasi kelompok kepentingan dapat memicu terjadinya tindakan anarkis terhadap yang ditujukan ke tempat-tempat ibadah yang terjadi. Lain seperti sehingga dapat berpotensi menimbulkan kasus bernuansa SARA yang berkepanjangan.

(2) Bentrok intern umat seagama dan antar umat agama lain.

konflik.....

Konflik/bentrokan antar umat beragama berkembang seiring dengan kebebasan melakukan ibadah agama. Penyebab konflik tersebut antara lain disebabkan oleh pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan/protes dari masyarakat di lingkungan tersebut, adanya kegiatan aliran agama yang berbeda dan adanya aliran-aliran yang dinyatakan terlarang oleh MUI dan lain sebagainya.

II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Sulsel

1) Visi

"Terwujudnya Sulawesi Selatan Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat".

Makna:

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi pada Polda Sulsel menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045. Penguatan fondasi organisasi Polda Sulsel diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju. Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Sulawesi Selatan, apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus-kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip "*equality before the law*". Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan Pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi dan pelayanan yang erat antara Kepolisian dan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui Kepolisian yang berorientasi masyarakat,

Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

2) Misi

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Sulawesi Selatan, serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “...Melindungi...” bermakna Polda Sulsel berperan dalam melindungi warga masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. “...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Polda Sulsel Polri melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Sulsel berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. “...Melayani...” bermakna Polda Sulsel harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta

memastikan.....

memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Visi dan Misi Polrestabes Makassar.

1) Visi

"Terwujudnya Kota Makassar Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat".

Makna:

Redaksional visi mencakup secara eksplisit aspirasi yang bersifat eksternal maupun internal. Visi pada Polrestabes Makassar menunjukkan aspirasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2029, sejalan dengan pentahapan *Grand Strategy* Polri 2025-2045 dan Renstra Polda Sulsel Tahun 2025-2029. Penguatan fondasi organisasi Polrestabes Makassar diharapkan dapat memberikan dampak pada kondisi nasional, yakni Indonesia Maju. Indonesia Maju akan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Kota Makassar apabila hal itu dicapai dengan aman, tertib, dan berkeadilan. Aman dan tertib terefleksi dari penurunan kasus-kasus kriminal dalam segala bentuknya. Sedangkan berkeadilan menunjukkan upaya penegakan hukum yang mengedepankan prinsip "*equality before the law*". Kepolisian yang berorientasi masyarakat atau *Citizen-centric Policing* adalah pendekatan pemolisian yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menekankan kolaborasi dan pelayanan yang erat antara Kepolisian dan masyarakat yang selaras dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada sinergi antara Polisi dan komunitas untuk mengidentifikasi, memahami dan mengatasi masalah keamanan serta sosial. Kepolisian yang berorientasi masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan hubungan.....

hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung antara Polisi dan masyarakat. Melalui Kepolisian yang berorientasi masyarakat, Polri dapat lebih efektif dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih baik.

2) Misi

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di Daerah Hukum Polrestabes Makassar”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat di Kota Makassar dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Kota Makassar, serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “...Melindungi...” bermakna Polrestabes Makassar berperan dalam melindungi Masyarakat Kota Makassar dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. “...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang berada di Kota Makassar, Polrestabes Makassar melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polrestabes Makassar berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib. “...Melayani...” bermakna Polrestabes Makassar harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan

bahwa.....

bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

2. Tujuan Jangka menengah.

a. Tujuan Polri

Adapun tema pembangunan Polda Sulsel Tahun 2026 adalah *“Polda Sulsel Siap Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”* dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polda Sulsel secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polda Sulsel yang berintegritas, modern, dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak azasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;
- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Sulsel agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan, profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polda Sulsel yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional Kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polda Sulsel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;

5)memperkuat.....

- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polda Sulsel.

b. Tujuan Polrestabes Makassar

Adapun tema pembangunan Polrestabes Makassar Tahun 2026 adalah *“Polrestabes Makassar Siap Mendukung Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”* dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat di daerah hukum Polrestabes Makassar secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polrestabes Makassar yang berintegritas, modern, dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak azasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;
- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polrestabes Makassar agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan, profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polrestabes Makassar yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional Kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang lebih professional sehingga dapat mendukung kinerja Polrestabes Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;

- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polrestabes Makassar.

3. Sasaran Prioritas

a. Polda Sulsel

Penahapan capaian Renstra Polda Sulsel Tahun 2025-2029, maka tahun 2026 dengan capaian: "Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polda Sulsel yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung almatsus Polda Sulsel yang modern", maka Sasaran Prioritas Polda Sulsel Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) **pertama:** "Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polda Sulsel";
- 2) **kedua:** "Kepolisian yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel";
- 3) **Ketiga:** "Mewujudkan kualitas pelayanan publik Polda Sulsel yang semakin inovatif";
- 4) **Keempat:** "Organisasi dan SDM Polda Sulsel yang adaptif, kompeten dan berintegritas";
- 5) **Kelima:** "Infrastruktur teknologi dan logistik Polda Sulsel yang tangguh aman dan mudah digunakan dengan memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)*";
- 6) **Keenam:** "Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional".

b. Polrestabes Makassar

Penahapan capaian Renstra Polrestabes Makassar Tahun 2025-2029, maka tahun 2026 dengan capaian: "Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polrestabes Makassar yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus

Polrestabes.....

Polrestabes Makassar yang modern“, maka sasaran prioritas Polrestabes Makassar tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) **Kesatu:** "Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah hukum Polrestabes Makassar";
- 2) **Kedua:** "Kepolisian yang efektif dan adaptif dalam menegakkan hukum secara adil dan akuntabel";
- 3) **Ketiga:** "Mewujudkan kualitas pelayanan publik Polrestabes Makassar yang semakin inovatif";
- 4) **Keempat:** "Organisasi dan SDM Polrestabes Makassar yang adaptif, kompeten dan berintegritas";
- 5) **Kelima:** "Infrastruktur teknologi dan logistik Polrestabes Makassar yang tangguh aman dan mudah digunakan dengan memanfaatkan *big data* dan *Artificial Intelligence (AI)*";
- 6) **Keenam:** "Meningkatkan akuntabilitas dan *agility* organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional".

III. ARAH.....

III. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel Tahun 2026

- a. Sasaran Prioritas I “Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat”, terdiri dari 11 (sebelas) arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kegiatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;
 - 2) Meningkatkan dan memperkuat upaya pengamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
 - 3) mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*);
 - 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis di tengah masyarakat;
 - 5) mewujudkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas;
 - 6) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Personel Polda Sulsel di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
 - 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional selama tahun 2026 di wilayah hukum Polrestabes Makassar;
 - 8) meningkatkan respon Kepolisian serta melaksanakan penggelaran operasional Kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan ancaman gangguan Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta menjalin sinergisitas polisional;

9)meningkatkan.....

- 9) meningkatkan Kolaborasi dalam kerja sama Kepolisian baik dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Kamtibmas;
- 10) meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal dan pesawat udara Polda Sulsel di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir;
- 11) meningkatkan kehadiran anggota Polda Sulsel di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi Kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;
(*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- 2) arah bijak: Meningkatkan dan memperkuat upaya pengamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)meningkatkan.....

- a) meningkatkan kegiatan patroli di wilayah rawan kejahatan, meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah Masyarakat serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan ditempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata.
(giat3130,3131,3134,3135,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(giat3143,progLidiksidik/SP1/ SS1/IKU1);
 - c) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/laman website humaspolda Sulsel.go.id secara berkala.
giat3149,progDukma /SP1/ SS1/IKU1);
- 3) arah bijak: mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*);
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi Kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

c)pembinaan.....

- c) Pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada Masyarakat pengguna jalan;
(giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 4) arah bijak: 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis di tengah masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) menganalisi potensi gangguan keamanan dengan meningkatkan peran Intelkam dalam mendeteksi awal potensi gangguan yang dapat terjadi di masyarakat
(giat3112,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - b) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - c) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif;
(giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - d) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern;
(giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 5) arah bijak: mewujudkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)melaksanakan.....

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(*giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(*giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) personel Brimob Polrestabes Makassar yang mampu digerakkan dalam menghadapi “*ketanggapsegeraan*” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi;
(*giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa;
(*giat3130,5081,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/internasional selama tahun 2026 di wilayah hukum Polda Sulsel;
untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)melaksanakan.....

- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/ internasional tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan;
(giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*;
(giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - c) melaksanakan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi;
(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - d) melaksanakan perencanaan operasi Kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;
(giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- 8) arah bijak: meningkatkan respon Kepolisian serta melaksanakan penggelaran operasional Kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan ancaman gangguan Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta menjalin sinergisitas polisional;
- untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik;
(giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(giat5076,5079,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
 - c)melaksanakan.....

- c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3120,3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 9) arah bijak: meningkatkan kolaborasi dalam kerja sama Kepolisian baik dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Kamtibmas;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan “*stakeholder*” terkait;
(*giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- b) meningkatkan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian Internasional, Organisasi Internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional;
(*giat3122,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional serta di wilayah perbatasan NKRI;
(*giat3122,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 10) arah bijak: meningkatkan kegiatan *surveillance* patroli kapal Polri di wilayah hukum Polda Sulsel guna mendukung terlaksananya pengamanan laut/pesisir;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan kegiatan patroli kapal Polda Sulsel dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(*giat3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

11) arahbijk: meningkatkan kehadiran anggota Polda Sulsel di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- membangun kolaborasi operasional Polda Sulsel bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;
(giat,3130,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

b. Sasaran Prioritas II “Kepolisian yang Efektif dan Adaptif dalam Menegakkan Hukum Secara Adil dan Akuntabel” terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) melanjutkan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi penyidik Polri;
- 3) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 11 (sebelas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia;
(giat3134,4342,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

kompetensi.....

- b) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(giat3143,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- c) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- d) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan;
(giat3142,3145,5083,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- e) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Indonesia;

(giat4342,progSidikLidik/SP2/SS2/IKU2);

- f) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP2/SS2/IKU2);

- g) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan

dan.....

dan keadilan;

(giat3142,progLidikSidik/SP3/SS3/IKU2);

- h) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber;

(giat3151,progLidikSidik;giat5076,pogHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2);

- i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;

(giat3130,progHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2);

- j) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;

(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- k) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.

(giat3140,3141,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- 2) arah bijak: melanjutkan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kompetensi penyidik Polri;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;

(giat3100,progProfesionalismeSDM/SP2/SS3/IKU2);

- b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik Labfor dan Inafis dalam pengungkapan tindak pidana;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP2/SS3/IKU2)

- 3) arah bijak: meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)memberikan.....

- a) memberikan *SP2HP2* kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
(*giat3137,5086,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2*);
 - b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(*giat5086,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2*);
 - c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(*giat5086,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2*);
- c. Sasaran Prioritas III “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:
- 1) mengoptimalkan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik dari masyarakat dan stakeholder terkait;
 - 2) meningkatkan Layanan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/ kebutuhan penanganan kejadian;
 - 3) melanjutkan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas layanan masyarakat yang berbasis TIK yang terintegrasi;
 - 4) meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polda Sulsel dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik;
 - 5) mengoptimalkan pelayanan di SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK;
 - 6)meningkatkan.....

- 6) meningkatkan *quick response* Layanan Kesehatan Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengoptimalkan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik dari masyarakat dan stakeholder terkait;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- melaksanakan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH secara rutin sebagai sarana komunikasi secara langsung dengan masyarakat;

(giat5076,progHarkamtibmas/SP3/SS1/IKU1);

- 2) arah bijak: meningkatkan Layanan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/ kebutuhan penanganan kejadian;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan kordinasi yang efektif mendukung penyelenggaraan informasi komunikasi yang efektif dengan memastikan anggota dilengkapi dengan perangkat komunikasi yang handal sehingga membangun jaringan komunikasi yang kuat untuk mendukung koordinasi dan respon yang cepat;

(giat3130,5080,progHarkamtibmas;giat3071progDukma/SP3/SS1/IKU1);

- 3) arah bijak: melanjutkan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas layanan masyarakat yang berbasis TIK yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)melanjutkan.....

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda Sulsel, Polres jajaran dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara *online*;
(*giat3071,progDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP3/SS4/IKP3*);
 - b) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polda Sulsel yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(*giat3071,progDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP3/SS4/IKP3*);
- 4) arah bijak: meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polda Sulsel dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- meningkatkan kesadaran anggota Polda Sulsel tentang dampak pungli terhadap masyarakat dengan pelatihan materi tentang peraturan perundang-undangan terkait pungli, komunikasi yang efektif dan studi kasus penanganan situasi rawan pungli;
(*giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat5076,3133,3128 progHarkamtibmas/SP3/SS3/IKPa*);
- 5) arah bijak: mengoptimalkan pelayanan di SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dengan mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pelaporan;
(*giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1*)
 - b) meningkatkan.....

- b) meningkatkan kemampuan personel Polda Sulsel dengan melakukan pelatihan dalam bidang penyelidikan dan penyidikan;
(*giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKPa*);
- 6) arah bijak: meningkatkan quick response Layanan Kesehatan Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas personel Polda Sulsel melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi infrastruktur dan peralatan medis, peneyempurnaan SOP dan protokol Komunikasi, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi *mobile* (*giat3072,progDukma/SP3/SS4/IKPb*)
- d. Sasaran Prioritas IV “Organisasi dan SDM Kepolisian yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas” terdiri dari 8 (delapan) arah bijak sebagai berikut:
- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas 8 standar pendidikan yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui pembelajaran dan inovasi;
 - 2) Mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*;
 - 3) meningkatkan kapabilitas SDM Polda Sulsel yang unggul melalui revitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel);
 - 4) melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;;
 - 5) meningkatkan pengelolaan SDM yang professional dan humanis melalui penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh;

6)menyempurnakan.....

- 6) menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan personalized learning serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi;
- 7) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat;
- 8) meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Sulsel melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) melanjutkan peningkatan kualitas 8 standar pendidikan yang adaptif, kompeten dan berintegritas melalui pembelajaran dan inovasi;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) meningkatkan mutu dari lulusan Diklat Polda Sulsel agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polda Sulsel ke depan;
(giat3096,3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
 - b) melaksanakan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
 - c) meningkatkan pelaksanaan Latihan dan Harkatpuan fungsi “*Dalmas dan Negosiator*” yang yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengamankan kegiatan masyarakat dan event nasional/internasional tahun 2025;
(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);
 - d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “*Menjunjung Tinggi HAM*” dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat dan menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;

(giat3100.....

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat5076,3130,5087,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPb);

- e) meningkatkan kapasitas SDM Polri di bidang siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan pengamanan *event nasional/ internasional* tahun 2025;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3141,3151,progLidikSidik/SP4/SS3/IKPb);

- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolaairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);

- g) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan PNS Polri;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat4341,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKPb);

- h) meningkatkan kapasitas personel kedokteran Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personel Polri dan keluarganya;

(giat3072,progDukma;giat3100progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPb);

- i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP di lingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mencegah terjadinya korupsi;

(giat3068,progDukma/SP4/SS3/IKPb);

- 2) arah bijak: mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)mengoptimalkan.....

- a) mengoptimalkan kebutuhan personel dalam hal jumlah, keterampilan dan kompetensi tiap satker/satwil jajaran Polda Sulsel;
(giat5052,progDukma/SP4/SS3/IKPb);
- b) meningkatkan pelayanan publik Polda Sulsel yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital;
(giat5052,5053,progDukma SP4/SS5/IKPc);
- 3) arah bijak: meningkatkan kapabilitas SDM Polri yang unggul melalui revitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel);
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis TI (*Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward*);
(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas

berdasarkan.....

berdasarkan kebijakan *zero growth*, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2025 sebanyak 7.000 orang untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;
(*giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

- e) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(*giat3107,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- f) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(*giat3104,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan *MoU* kermadiklat Dagri dan Lugri;
(*giat3100,progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa*);
- b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri;
(*giat3100,progProfesionalismeSDMPolri;giat3120,3122,progHarkamtibmas/SP4/SS3/IKPa*);
- c) menyelenggarakan kerja sama dengan *stakeholder*, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

5)arahbijak.....

5) arah bijak: meningkatkan pengelolaan SDM yang professional dan humanis melalui penyempurnaan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan penyempurnaan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “sistem *reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polda Sulsel yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polda Sulsel (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);
- c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(*giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa*);

6) arah bijak: menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengembangkan sistem informasi manajemen karir yang terintegrasi dengan data kebutuhan Polda Sulsel seperti proyeksi kebutuhan jabatan dan analisis kesenjangan kompetensi.....

kompetensi dengan memberikan rekomendasi jalur karir, pelatihan, dan rotasi yang personal berdasarkan data individu dan kebutuhan organisasi;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- b) melaksanakan asesmen kompetensi secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan setiap personel;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- c) memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi personel yang bertanggung jawab dalam pengembangan karir, seperti asesor kompetensi, konselor karier, dan pengelola pelatihan untuk personel;

(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- 7) arah bijak: mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) menerapkan nilai-nilai budaya organisasi yang mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat serta tantangan tugas yang dihadapi Polri utamanya di wilayah hukum Polda Sulsel melalui program pelatihan di seluruh jenjang pendidikan Polri;

(giat3100,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

- b) membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan sanksi yang tegas dan efektif untuk personel yang melanggar nilai-nilai budaya organisasi;

(giat3088,progDukma/SP4/SS5/IKPd);

- 8) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polda Sulsel melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 5 (lima) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota Polda Sulsel dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072,progDukma/SP4/SS3/IKPa);
 - b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polri yang gugur/tewas saat tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;
(giat3072,progDukma;giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polda Sulsel, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan user friendly termasuk berkaitan dengan Asabri;
(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat3072,5062,progDukma/SP4/SS5/IKPa);
 - e) memfasilitasi kepemilikan rumah pribadi bagi anggota Polrestabes Makassar melalui program-program kredit perumahan yang layak dan terjangkau;
(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- e. Sasaran Prioritas V “Infrastruktur Teknolgi dan Logistik Polri yang Tangguh Aman dan Mudah digunakan dengan Memanfaatkan big data dan *Artificial Intelligence* (AI)” terdiri dari 7 (tujuh) arah bijak sebagai berikut:
- 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polda Sulsel yang modern guna mendukung

peningkatan.....

peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

- 2) mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalhankam di lingkungan Polri;
- 3) pemenuhan rumah dinas bagi pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan, destinasi wisata, kawasan industri, dan PPKT;;
- 4) melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
- 5) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation (SCI)*;
- 6) melanjutkan pembangunan Mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital *Platform* dan *Software* (DDPS) yang terintegrasi dalam Satu Data Polri yang terintegrasi;
- 7) mengoptimalkan sistem hotline 110 dalam menerima dan merespons pengaduan/ pelaporan masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polrestabes Makassar yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 13 (tiga belas) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara *online*; (*giat3071,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*);

b)melanjutkan.....

- b) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polda Sulsel yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB *prototype* dan gedung Satpas *prototype*;
(giat3071,progDukma;giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- d) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia *Safety Driving Center*;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- e) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- f) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- g) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri;

(giat5060.....

(giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- h) melaksanakan Litbang pembuatan *prototype* peralatan Polda Sulsel berbasis teknologi dan inovasi teknologi Kepolisian terkini;

(giat3071,5067,progDukma;prog3084,5060,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- i) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana;

(giat5055,progDukma;giat3084,5060,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- j) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*);

(giat5060,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri /SP5/SS4/IKPa);

- k) pemenuhan peralatan penanganan awal bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat;

(giat3084,5060,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- l) pemenuhan kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbarukan;

(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan event nasional/internasional tahun 2026, pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata;

(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- 2) arah bijak: mendukung peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional dalam pemenuhan Almatsus Alpalkam di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)melanjutkan.....

- a) melanjutkan kerja sama dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan *prototype*, berikut melakukan Standardisasi dan Sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri;
(*giat5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*)
 - b) mendorong penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan pengadaan Almatsus dan Alsus Polri;
(*giat4341,progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*);
- 3) arah bijak: pemenuhan rumah dinas bagi pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk wilayah perbatasan, destinasi wisata,kawasan industri dan PPKT; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan usulan pembangunan fasilitas Kantor Pusat Polri di IKN dan pembangunan Mako Polres/Polrestabes kawasan IKN;
(*giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*)
 - b) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri di seluruh wilayah termasuk di wilayah perbatasan, terjauh dan terluar Indonesia;
(*giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*)
 - c) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, Poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung “*Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*”;

(giat5062.....

(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- 4) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - melanjutkan pembangunan dan pengembangan laboratorium forensik beserta rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana;
(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- 5) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation (SCI)*;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini;
(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
 - b) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana indentifikasi Kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik Kepolisian;
(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- 6) arah bijak: melanjutkan pembangunan yang mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital Platform dan Software (DDPS) yang terintegrasi dalam Satu Data Polri yang terintegrasi;

untuk.....

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika Kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap;
(giat3071,5055,ProgDukma;giat3084,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* Kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5055,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);
- c) mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika Kepolisian berdasarkan hasil penelitian;
(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri;giat5067,progDukma/SP5/SS4/IKPa);

7) arah bijak: mengoptimalkan sistem *hotline* 110 dalam menerima dan merespons pengaduan/pelaporan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- menerapkan sistem yang terintegrasi antara *hotline* 110 dengan sistem informasi Kepolisian lainnya, seperti sistem pelacakan lokasi, sistem identifikasi, dan sistem manajemen kasus sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap laporan masyarakat
(giat5055,progDukma/SP5/SS4/IKPa);

f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

1)meningkatkan.....

- 1) meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi Kepolisian dan Masyarakat menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
- 2) melanjutkan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan internal Polri;
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polri;
- 4) menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;
- 5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan standardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP serta melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana dan penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien;
- 6) mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri di tengah masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi Kepolisian dan Masyarakat menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;

(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc);

- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;

(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc);

c)meningkatkan.....

- c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*; (*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - d) mengoptimalkan akses informasi yang lebih luas kepada publik mengenai hasil pemeriksaan dan pengawasan internal Polri (*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);
 - e) Memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; (*giat5086,progLidikSidik/SP6/SS2/IKU2*);
 - f) Membangun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan informasi; (*giat5056,progDukma/SP6/SS4/IKPb*);
- 2) arah bijak: melanjutkan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Siber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091,progDukma/SP6/SS2/IKU2*);
 - b) mendorong pelayanan *public* secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (*giat3091,3149,progDukma/SP6/SS4/IKPb*);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (*giat3091,progDukma/SP6/SS2/IKU2*);
 - d)melanjutkan.....

- d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS3/IKPa);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk Pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS3/IKPa);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “operasi bersih” terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik Kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polda Sulsel;
- untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System* (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);

- 4) arah bijak: menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polrestabes Makassar;
untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri;
(*giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polda Sulsel dalam *e-Jakstra* dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polrestabes Makassar yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri;
(*giat5051,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(*giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - d) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(*giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
- 5) arah bijak: meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Sulsel dengan standardisasi, menyempurnakan dan

memastikan.....

memastikan pelaksanaan SOP serta melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana dan penguatan struktur organisasi Polda Sulsel agar efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap;
(giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPb);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Polrestabes Makassar dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru;
(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPa);
 - c) melaksanakan perubahan peraturan Kepolisian tentang SOTK tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPa);
- 6) arah bijak: mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Sulsel di tengah Masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polda Sulsel untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur);
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPa);

b)melanjutkan.....

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polrestabes sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polda Sulsel;
(giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPc);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polda Sulsel yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polda Sulsel yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI);
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPc);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPa);

2. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polrestabes Makassar Tahun 2026

- a. Sasaran Prioritas I “Kepolisian yang responsif dan prediktif untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat”, terdiri dari 10 (sepuluh) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan kegiatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

2)meningkatkan.....

- 2) Meningkatkan dan memperkuat upaya pengamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- 3) mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*);
- 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis di tengah masyarakat;
- 5) mewujudkan Kamseltibcar lantas guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas;
- 6) meningkatkan dan melanjutkan peran aktif dan kehadiran Personel Polrestabes Makassar di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan *event* nasional/ internasional selama tahun 2026 di wilayah hukum Polrestabes Makassar;
- 8) meningkatkan respon Kepolisian serta melaksanakan penggelaran operasional Kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan ancaman gangguan Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta menjalin sinergisitas polisional;
- 9) meningkatkan Kolaborasi dalam kerja sama Kepolisian dalam negeri dengan Instansi terkait atau setingkat guna mendukung Stabilitas Kamtibmas;
- 10) meningkatkan kehadiran anggota Polrestabes Makassar di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

-meningkatkan.....

- meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi Sat Intelkam Polrestabes Makassar melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi Kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- 2) arah bijak: Meningkatkan dan memperkuat upaya pengamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan patroli di wilayah rawan kejahatan, meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah Masyarakat serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan ditempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata.
(giat3130,3131, ,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);
- b) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/laman website humas Polrestabes Makassar.go.id secara berkala.
(giat3070,progDukma /SP1/SS1/IKU1);

3)arahbijak.....

- 3) arah bijak: mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas” (*Cooling System*);

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan fungsi Kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- c) Pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP;
(*giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada Masyarakat pengguna jalan;
(*giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- 4) arah bijak: 4) mengedepankan penanganan konflik secara humanis di tengah masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) menganalisi potensi gangguan keamanan dengan meningkatkan peran Intelkam dalam mendeteksi awal potensi gangguan yang dapat terjadi di masyarakat
(*giat3112,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

- b) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

c)mengorganisasikan.....

- c) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 5) arah bijak: mewujudkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat beraktivitas;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat;
(*giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas;
(*giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan “*Slum Area*”;
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) personel Sat Sabhara Polrestabes Makassar yang mampu digerakkan dalam menghadapi “*ketanggapsegeraan*” dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi;
(*giat3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara;
(*giat3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - c)memetakan.....

- c) memetakan Kelurahan yang rawan bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana;
(*giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/internasional selama tahun 2026 di wilayah hukum Polrestabes Makassar;
- untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2026 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawasan;
(*giat,3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*;
(*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - c) melaksanakan perencanaan operasi Kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2025;
(*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 8) arah bijak: meningkatkan respon Kepolisian serta melaksanakan penggelaran operasional Kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan ancaman gangguan Kamtibmas dan Penegakan Hukum serta menjalin sinergisitas polisional;
- untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up pengamanan di wilayah rawan konflik;
(*giat3130,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);

b)membangun.....

- b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(*giat5076,5079,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(*giat3130,3131,3133progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 9) arah bijak: meningkatkan kolaborasi dalam kerja sama Kepolisian dalam negeri dengan Instansi terkait atau setingkat guna mendukung Stabilitas Kamtibmas;
untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "*stakeholder*" terkait;
(*giat3073,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
 - b) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait guna mendukung kerja sama Kepolisian, Organisasi dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan citra positif Polri;
(*giat3176,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*);
- 10) arahbijak: meningkatkan kehadiran anggota Polrestabes Makassar di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;
untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- membangun kolaborasi operasional Polrestabes Makassar bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di

wilayah.....

Wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut;

(giat,3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1);

- b. Sasaran Prioritas II “Kepolisian yang Efektif dan Adaptif dalam Menegakkan Hukum Secara Adil dan Akuntabel” terdiri dari 2 (dua) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan penanganan dan penyelesaian tindak pidana oleh penyidik guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melakukan penyelidikan terhadap ancaman tindak pidana terorisme, dan penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(giat3142,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- b) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian,

penyelundupan.....

penyelundupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

(giat3140,3142,3144,3146,5083,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan;
(giat3142,5083,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- d) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP2/SS2/IKU2);

- e) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142,progLidikSidik/SP3/SS3/IKU2);

- f) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (*cyber crime*) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber;
(giat5076,pogHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2);

- g) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas;
(giat3130,progHarkamtibmas/SP2/SS2/IKU2);

- h) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;

(giat 3142.....

(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- i) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti.
(giat3140,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- 2) arah bijak: meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) memberikan *SP2HP2* kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
(giat3137,progLidikSidik/SP2/SS2/IKU2);

- b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat3091,progDukma/SP2/SS2/IKU2);

- c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat3091,progDukma/SP2/SS2/IKU2);

- c. Sasaran Prioritas III “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang Semakin Inovatif” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengoptimalkan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik dari masyarakat dan stakeholder terkait;

2)meningkatkan.....

- 2) meningkatkan Layanan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/ kebutuhan penanganan kejadian;
- 3) melanjutkan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas layanan masyarakat yang berbasis TIK yang terintegrasi;
- 4) meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polrestabes Makassar dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik;
- 5) mengoptimalkan pelayanan di SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK;
- 6) meningkatkan *quick response* Layanan Kesehatan Kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengoptimalkan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH” sebagai sarana untuk menerima kritik, masukan maupun aduan publik dari masyarakat dan stakeholder terkait;

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- melaksanakan kegiatan “JUMAT CURHAT dan MINGGU KASIH secara rutin sebagai sarana komunikasi secara langsung dengan masyarakat;

(giat5076,progHarkamtibmas/SP3/SS1/IKU1);

- 2) arah bijak: meningkatkan Layanan kecepatan dan efektivitas respons polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/ kebutuhan penanganan kejadian;

untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan koordinasi yang efektif mendukung penyelenggaraan informasi komunikasi yang efektif dengan memastikan anggota dilengkapi dengan perangkat komunikasi yang hadal sehingga membangun jaringan komunikasi.....

komunikasi yang kuat untuk mendukung koordinasi dan respon yang cepat;

(giat3130,progHarkamtibmas;giat3073progDukma/SP3/SS1/IKU1);

- 3) arah bijak: melanjutkan modernisasi fasilitas sarana dan prasarana pada sentra pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas layanan masyarakat yang berbasis TIK yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polrestabes Makassar, Polres jajaran dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara *online*;

(giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP3/SS4/IKP3);

- b) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polrestabes Makassar yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;

(giat5059.5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP3/SS4/IKP3);

- 4) arah bijak: meningkatkan dan menjaga profesionalisme anggota Polrestabes Makassar dalam melayani masyarakat guna meniadakan segala pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan kesadaran anggota Polrestabes Makassar tentang dampak pungli terhadap masyarakat dengan pelatihan materi tentang peraturan perundang-undangan.....

undangan terkait pungli, komunikasi yang efektif dan studi kasus penanganan situasi rawan pungli;

(*giat5076,3133,3128 progHarkamtibmas/SP3/SS3/IKPa*);

- 5) arah bijak: mengoptimalkan pelayanan di SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK;
untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dengan mengoptimalkan proses penyelidikan dan penyidikan dimulai dari pelaporan;
(*giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1*);

- 6) arah bijak: meningkatkan quick response Layanan Kesehatan kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas personel Polrestabes Makassar melalui pelatihan dan sertifikasi, optimalisasi infrastruktur dan peralatan medis, peneyempurnaan SOP dan protokol Komunikasi, penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi *mobile* (*giat3073,progDukma/SP3/SS4/IKPb*)

- d. Sasaran Prioritas IV “Organisasi dan SDM Kepolisian yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas” terdiri dari 3 (tiga) arah bijak sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*;
- 2) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat;

3)meningkatkan.....

- 3) meningkatkan kesejahteraan SDM Polrestabes Makassar melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) mengoptimalkan kebutuhan personel dalam hal jumlah, keterampilan dan kompetensi tiap satker/satwil jajaran Polrestabes Makassar;
(giat3073,progDukma/SP4/SS3/IKPb);
 - b) meningkatkan pelayanan publik Polrestabes Makassar yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital;
(giat3073,progDukma SP4/SS5/IKPc);
- 2) arah bijak: mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - membangun mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan sanksi yang tegas dan efektif untuk personel yang melanggar nilai-nilai budaya organisasi;
(giat3090,progDukma/SP4/SS5/IKPd);
- 3) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polrestabes Makassar melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri;
untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a)meningkatkan.....

- a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota Polrestabes Makassar dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3073,progDukma/SP4/SS3/IKPa);
- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai Polri yang gugur/tewas saat tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;
(giat3073,progDukma/SP4/SS3/IKPa);
- c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polrestabes Makassar, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan user friendly termasuk berkaitan dengan Asabri;
(giat3073,progDukma/SP4/SS3/IKPa);
- e. Sasaran Prioritas V “Infrastruktur Teknolgi dan Logistik Polri yang Tangguh Aman dan Mudah Digunakan dengan Memanfaatkan big data dan *Artificial Intelligence* (AI)” terdiri dari 5 (lima) arah bijak sebagai berikut:
 - 1) memodernisasi serta memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polrestabes Makassar yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - 2) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation* (SCI);
 - 3)melanjutkan.....

- 3) melanjutkan pembangunan Mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital *Platform* dan *Software* (DDPS) yang terintegrasi dalam Satu Data Polri yang terintegrasi;
- 4) mengoptimalkan sistem hotline 110 dalam menerima dan merespons pengaduan/ pelaporan masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polrestabes Makassar yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 9 (sembilan) strategi yang akan dilakukan yaitu:
 - a) melanjutkan pemenuhan Almatsus Polrestabes Makassar yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(*giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*);
 - b) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi;
(*giat3133,progHarkamtibmas;giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*);
 - c) melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia *Safety Driving Center*;
(*giat3133,progHarkamtibmas;giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa*);
 - d) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC;

(*giat3133.....*

(giat3133,progHarkamtibmas;giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- e) melanjutkan pembangunan/pemasangan *ETLE* guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya;

(giat3133,progHarkamtibmas;giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- f) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri;
(giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- g) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (*MEPE*);
(giat5059,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- h) pemenuhan peralatan penanganan awal bencana, Karhutla dan banjir dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat;
(giat5059,5061,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- i) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan event nasional/internasional tahun 2026, pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata;
(giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- 2) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus *Scientific Criminal Investigation (SCI)*;
untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana indentifikasi Kepolisian terkini guna

mendukung.....

mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik Kepolisian;

(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- 3) arah bijak: melanjutkan pembangunan yang mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan Data Digital Platform dan Software (DDPS) yang terintegrasi dalam Satu Data Polri yang terintegrasi;

untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika Kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap;
(giat5059,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline Kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat5059,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- c) mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika Kepolisian berdasarkan hasil penelitian;
(giat5059,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPa);

- 4) arahbijak: mengoptimalkan sistem hotline 110 dalam menerima dan merespons pengaduan/pelaporan masyarakat; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 1 (satu) strategi yang akan dilakukan yaitu;

- menerapkan sistem yang terintegrasi antara hotline 110 dengan sistem informasi Kepolisian lainnya, seperti sistem pelacakan lokasi, sistem identifikasi, dan sistem

manajemen.....

manajemen kasus sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat dan efektif terhadap laporan masyarakat (*giat3128,progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKPa*);

f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian” terdiri dari 6 (enam) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi Kepolisian dan Masyarakat menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;
- 2) melanjutkan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan internal Polri;
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polri;
- 4) menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;
- 5) meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polri dengan standardisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP serta melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana dan penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien;
- 6) mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri di tengah masyarakat;

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kepuasan dan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi Kepolisian dan Masyarakat menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya;

a)mengoptimalkan.....

untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat 6 (enam) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);

b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online*;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);

c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal*;
(*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);

d) mengoptimalkan akses informasi yang lebih luas kepada publik mengenai hasil pemeriksaan dan pengawasan internal Polri
(*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPc*);

e) Memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
(*giat3070;progDukma/SP6/SS2/IKU2*);

f) Membangun sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan informasi;
(*giat3070,progDukma/SP6/SS4/IKPb*);

2) arah bijak: melanjutkan pelaksanaan kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Siber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP

pemda.....

Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi;

(*giat3091,progDukma/SP6/SS2/IKU2*);

- b) mendorong pelayanan *public* secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *Medsos/Whatsapp*; (*giat3070,progDukma/SP6/SS4/IKPb*);

- c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (*giat3089,3091,progDukma/SP6/SS2/IKU2*);

- d) melanjutkan pelaksanaan kegiatan “*operasi bersih*” terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik Kepolisian (SIM, SKCK);

(*giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);

- 3) arahbijak; meningkatkan kegiatan pencegahan perilaku yang menyimpang (perilaku arogan dan tidak profesional) serta perbuatan korupsi di internal Polrestabes Makassar; untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat 2 (dua) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*. Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (*giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);

- b) melanjutkan sosialisasi “Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017” tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (*giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd*);

- 4) arah bijak: menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polrestabes Makassar; untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri; (*giat3073,3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polrestabes Makassar dalam *e-Jakstra* dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polrestabes Makassar yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; (*giat3073,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (*giat3073,3088,30893091,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
 - d) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (*giat3073,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPb*);
- 5) arah bijak: meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polrestabes Makassar dengan standardisasi,

menyempurnakan.....

menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP serta melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana dan penguatan struktur organisasi Polrestabes Makassar agar efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat 3 (tiga) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap;
(giat3128,progHarkamtibmas/SP6/SS5/IKPb);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Polrestabes Makassar dan Satuan Kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru;
(giat3128,progHarkamtibmas/SP6/SS5/IKPa);
 - c) melaksanakan perubahan peraturan Kepolisian tentang SOTK tingkat Polres, Polsek dan Polsubsektor;
(giat3128,progHarkamtibmas/SP6/SS5/IKPa);
- 6) arah bijak: mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polrestabes Makassar di tengah Masyarakat;

untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat 4 (empat) strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polrestabes Makassar untuk memedomani kebijakan Forum Konsultansi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/*stakeholder* terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur);
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPa);

melanjutkan.....

- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres//Polrestabes sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polrestabes Makassar;
(giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPc);
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI);
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPc);
- d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPa);

IV. Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Polrestabes Makassar T.A. 2026

1. Program dan Kegiatan

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan:

menanggulangi dan meningkatkan penyelesaian perkara empat jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana lalu lintas ; dan,
- g) penindakan tindak pidana tertentu;

b. Program Modernisasi Almatas Sarana dan Prasarana Polri.

1) Tujuan:

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa, baik kualitas maupun kuantitas.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknik Sarpras; dan,
- b) pengembangan perbekalan umum;

c) program.....

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

mengembangkan langkah-langkah strategis mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun.

2) Kegiatan:

- a) analisa Keamanan;
- b) penyelenggaraan Strategi Kemanan dan Ketertiban Bidang Politik;
- c) penyelenggaraan Strategi Kemanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
- d) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;
- e) penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
- f) dukungan menejemen dan teknis pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- g) pembinaan pelayanan fungsi sabhara;
- h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang lintas;
- j) pembinaan potensi keamanan;
- k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
- l) pembinaan operasi Kepolisian

d. Program Dukungan Manajemen

1) Tujuan:

Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan fungsi kinerja

polri.....

Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu akuntabel dan terintegrasi.

- 2) Kegiatan:
- a) penerangan masyarakat;
 - b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
 - c) pertanggungjawaban profesi;
 - d) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
 - e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
 - f) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
 - g) Kerjasama dan penyuluhan hukum;
 - h) Reformasi birokrasi Polri;

2. Pagu Indikatif Polrestabes Makassar T.A. 2026

Pagu Indikatif Polrestabes Makassar T.A. 2026 beserta jajarannya yang terdiri dari Satker Mapolrestabes Makassar 21 Satker dan Polsek Jajaran 12 dan 1 Polsubsektor dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 220.343.145.000 (dua ratus dua puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian per Program dan Kegiatan sebagai berikut:

a. Rincian Pagu Indikatif Polrestabes Makassar T.A. 2026

Per Jenis Belanja sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| 1) belanja pegawai | Rp. | 176.660.423.000,- |
| 2) belanja barang | Rp. | 43.682.722.000,- |

b. Rincian Pagu Indikatif T.A. 2026 Per Sumber Anggaran

sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|-----|-------------------|
| 1) Sumber Rupiah Murni | Rp. | 213.792.720.000,- |
| 2) Sumber PNBP | Rp. | 6.550.425.000,- |

c. 060.01.BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Rp. 13.218.615.000,- digunakan untuk kegiatan:

- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1) Dukungan Manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: | Rp. | 2.846.472.000,- |
| RM | Rp. | 2.846.472.000,- |
| 2) Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana: | Rp. | 82.000.000,- |
| RM | Rp. | 82.000.000,- |
| 3) Penindakan tindak pidana umum: | Rp. | 5.976.319.000,- |
| RM | Rp. | 5.976.319.000,- |
| 4) Penindakan tindak pidana narkoba: | Rp. | 2.584.028.000,- |
| RM | Rp. | 2.584.028.000,- |
| 5) Penindakan tindak pidana Korupsi: | Rp. | 1.233.996.000,- |
| RM | Rp. | 1.233.996.000,- |
| 6) Penindakan tindak pidana lalu lintas: | Rp. | 428.135.000,- |
| PNBP | Rp. | 428.135.000,- |
| 7) Penindakan tindak pidana tertentu: | Rp. | 67.665.000,- |
| RM | Rp. | 67.665.000,- |

d. 060.01.BP Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 2.438.396.000,- digunakan untuk kegiatan:

- | | | |
|---|-----|------------------------|
| 1) Dukungan Manajemen Dan teknik sarpras: | Rp. | 490.354.000,- |
| PNBP | Rp. | 485.354.000,- |
| RM | Rp. | 5.000.000,- |
| 2) pengembangan umum: | Rp. | 1.948.042.000,- |
| PNBP | Rp. | 1.948.042.000,- |

e.060.01.BQ

e. 060.01.BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 18.132.025.000,- digunakan untuk kegiatan:

1)	Analisa kemanan:	Rp.	53.670.000,-
	RM	Rp.	53.670.000,-
2)	Penyelenggaraan strategi kemanan dan ketertiban bidang politik:	Rp.	490.034.000,-
	PNBP	Rp.	1.295.000,-
	RM	Rp.	488.739.000,-
3)	Penyelenggaraan strategi kemanan dan ketertiban bidang ekonomi:	Rp.	490.169.000,-
	PNBP	Rp.	1.295.000,-
	RM	Rp.	488.874.000,-
4)	Penyelenggaraan strategi kemanan dan ketertiban bidang sosial budaya:	Rp.	653.036.000,-
	PNBP		1.295.000,-
	RM	Rp.	651.741.000,-
5)	Penyelenggaraan strategi kemanan dan ketertiban bidang keamanan negara:	Rp.	873.508.000,-
	PNBP	Rp.	1.665.000,-
	RM	Rp.	871.843.000,-
6)	Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat:	Rp.	6.693.129.000,-
	PNBP	Rp.	192.240.000,-
	RM	Rp.	6.500.889.000,-
7)	Pembinaan pelayanan fungsi sabhara;	Rp.	1.815.429.000,-
	RM	Rp.	1.815.429.000,-
8)	Penyelenggaran pengamanan Objek Vital;	Rp.	455.232.000,-
	PNBP	Rp.	455.232.000,-

9)peningkatan

9)	peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan masyarakat di Bidang Lantas	Rp.	3.035.872.000,-
	PNBP	Rp.	3.035.872.000,-
10)	Pembinaan Potensi Keamanan;	Rp.	2.687.450.000,-
	RM	Rp.	2.687.450.000,-
11)	Pembinaan Operasional Pemeliharaan Keamanan	Rp.	24.978.000,-
	RM	Rp.	24.978.000,-
12)	Pembinaan Operasi Kepolisian	Rp.	859.518.000,-
	RM	Rp.	859.518.000,-

f. 060.01.WA Program Dukungan Manajemen

Rp.186.554.109.000,- digunakan untuk kegiatan:

1)	Penerangan masyarakat	Rp.	143.084.000,-
	RM	Rp.	143.084.000,-
2)	Dukungan pelayanan internal perkantoran polri	Rp.	186.059.960.000,-
	RM	Rp.	186.059.960.000,-
3)	Pertanggungjawaban profesi	Rp.	23.538.000,-
	RM	Rp.	23.538.000,-
4)	Penyelenggaraan pengamanan internal polri	Rp.	42.374.000,-
	RM	Rp.	42.374.000,-

5)penegakan.....

5)	Penegakan tata tertib dan Disiplin Polri:	Rp.	78.150.000,-
	RM	Rp.	78.150.000,-
6)	Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan:	Rp.	70.003.000,-
	RM	Rp.	70.003.000,-
7)	Kerja sama dan penyuluhan hukum:	Rp.	122.000.000,-
	RM	Rp.	122.000.000,-
8)	Reformasi birokrasi Polri:	Rp.	15.000.000,-
	RM	Rp.	15.000.000,-

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Polrestabes Makassar Tahun 2026, disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan di jajaran Polrestabes Makassar.

Makassar, 18 Juli 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL



ARYA PERDANA, S.H., S.I.K., M.Si
KORPRI BESAR POLISI NRP 76030826

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) T.A. 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2026	
1	2	3	4	5
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali melalui Kepolisian yang berintegritas, Modern dan Akuntabel di Kota Makassar.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	3,50	<i>Sasaran Impact (IKU Bersifat Outcome)</i>
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat di wilayah Polrestabes Makassar yang Responsif dan Prediktif.	Indeks Harkamtibmas	3,50	Outcome
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan di Kota Makassar.	Indeks Gakkum	3,50	Outcome
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polrestabes Makassar yang Adaptif, Kompeten dan Berintegritas secara Terpadu dan Optimal.	Indeks Profesionalitas SDM Polri pada Polrestabes Makassar	64,50	Nomenclatur selaras dengan Grand Strategi Polri
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang Berdaya Guna dan Modern	a. Tingkat Pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment (MEPE)</i>	50,94%	Outcome
		b. Indeks Kualitas Data	3,10	

141 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTABES MKS

NOMOR : KEP/ 77 /VII/2025

TANGGAL : 18 JULI 2025

1	2	3	4	5
SS5	Tata kelola yang bersih,Transparan dan Akuntabel	a. Nilai Sakip	73	<i>IKP tetap, Target Naik</i>
		b. Nilai Kinerja Anggaran	97	Outcome
		c. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Polri pada Polrestabes Makassar	72	Outcome
		d. Persentase Penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri pada Polrestabes Makassar	77%	Outcome

Makassar, 18 Juli 2025

KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL



ARYA PERDANA, S.H., S.I.K., M.Si

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76030826